

Krisis Ekonomi Masyarakat Indonesia Pada Lapisan Bawah

Suatu analisis yang memfokuskan pada efek krisis sosial ekonomi dan langkah-langkah yang dilaksanakan oleh pemerintah serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk meningkatkan kesejahteraan lapisan ini.

The Economic Crisis As It Concerns The Lower Socio Classes Of The Indonesian Society

An analysis focusing on the social economic effects of this crisis and the subsequent current counter measures taken by government and non government organisations (NGO) to advance the welfare of the lower socio class.

TUGAS STUDI LAPANGAN

Oleh : Johan Weintré

Kerjasama Antara

ACICIS

Australian Consortium For In Country Indonesian Studies



**Malang
2000**

KATA PENGANTAR

Untuk melengkapi persyaratan studi lapangan beberapa pihak sudah banyak membantu pada penulis secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk moril atau materil. Karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- Drs. Deden F, MA, dosen pembimbing yang membantu mencarikan sumber informasi dan memberikan bimbingan selama proyek ini.
- Dra Vina Salviana DS, Msi Sekretaris ACICIS dan DRS. H.A Habib M.A. Selaku Dekan FISIP dan Ketua Program ACICIS atas penolongan selama semester di Malang.
- Dr G. & H. van Klinken, Resident Directors ACICIS atas motivasi selama semester ini.
- Dosen-dosen di Universitas Muhammadiyah Malang yang mengajari mahasiswa atas kuliah yang berisi keterangan dan informasi yang diberi luar kuliah.
- Bapak Hans Schöppe, yang mendorong dan memberi saranan kepada penulis sebelum datang ke Malang.
- Julius, yang membantu saya selama di Yogyakarta.
- Ibu kos, anak kos dan teman yang menolong memperbaiki bahasa.
- Semua pejabat dan sukarelawan dari instansi-instansi yang telah membantu.

- Semua pihak yang membantu penulis menyelesaikan laporan ini.
- Michelle, yang selalu sabar dan menolong sebelum dan selama waktu studi di Indonesia.

Akhir penulis menyadari tulisan ini memiliki banyak kekurangan, karena sangat diharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca demi perbaikan dan sekaligus memperbesar manfaat tulisan ini sebagai referensi.

Malang 2 Juni 2000

Penulis,

Johan Weintré

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| KATA PENGANTAR | |
| DAFTAR ISI | i |
| ABSTRAKSI | iii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 14 |
| 1.3. Tujuan Studi Lapangan | 15 |
| 1.4. Kegunaan Studi Lapangan | 15 |
| 1.5. Metodologi Studi Lapangan | 16 |
| 1.6. Batasan Studi Lapangan | 17 |
| | |
| BAB II PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT | 19 |
| 2.1. Pengembangan Jaring Pengaman Sosial | 19 |
| 2.2. Program Program yang Dilaksanakan Pemerintah | 22 |
| 2.3. Program Kerjasama Bank Dunia dan Pemerintah | 32 |
| 2.4. Program Beras Palang Merah Indonesia | 34 |
| | |
| BAB III JAWA TIMUR | 36 |
| 3.1. Pendahuluan - Kota Malang | 36 |
| 3.2. Sifat-sifat Kelurahan Lesanpuro | 36 |
| 3.3. Program JPS di Kelurahan Lesanpuro | 37 |

| | | |
|---------------|---|-----------|
| BAB IV | SULAWESI UTARA | 44 |
| 4.1. | Pendahuluan - Kota Manado | 44 |
| 4.2. | Sifat-sifat Kelurahan Tuminting | 45 |
| 4.3. | Program JPS di Kelurahan Tuminting | 46 |
| BAB V | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | 50 |
| 5.1. | Pendahuluan Kota Yogyakarta | 50 |
| 5.2. | Sifat-sifat Kelurahan Terban | 50 |
| 5.3. | Program JPS di Kelurahan Terban | 51 |
| BAB VI | PENUTUP | 58 |
| 6.1. | Kesimpulan Dari Hasil Pengamatan Studi Lapangan | 58 |
| 6.2. | Saran | 61 |
| | DAFTAR PUSTAKA | 63 |
| | LAMPIRAN-LAMPIRAN | 65 |

ABSTRAKSI

Studi Lapangan Oleh Johan Weintré

Tanggal 2 Juni 2000

Krisis Ekonomi Masyarakat Indonesia Pada Lapisan Bawah

Suatu analisis yang memfokuskan pada efek krisis sosial ekonomi dan langkah-langkah yang dilaksanakan pemerintah serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk meningkatkan kesejahteraan lapisan bawah.

Pasal 25 paragraf 1 dari Deklarasi Dunia Hak Manusia menyatakan bahwa:

“ Siapunpun punya hak atas tingkat kehidupan yang cukup untuk kesehatan dan kesejahteraan diri sendiri dan keluarganya, termasuk makanan.”

Krisis Moneter, atau yang dikenal dengan istilah “Krismon”, ialah sebuah kemacetan aliran keuangan antara lain, dimulai sekitar bulan Juli 1997 di Indonesia. Indonesia tidak menderita krisis moneter saja, tetapi juga ditambah dengan krisis ekonomi dan krisis politik serta moral. Kelompok yang paling bawah mengalami kesulitan kebutuhan primer. Pada tahun 1976 penduduk miskin di Indonesia diperkirakan 39 persen. Kemudian pada tahun 1996 sudah berkurang sampai 9 persen. Jumlah tersebut berkurang dari 55 juta jiwa menjadi 23 juta jiwa saja. Angka itu meningkat sampai 47 juta jiwa di tahun 1998 Laporan yang terbit pada bulan Juni 1999, jumlah meningkat lagi sampai 79 juta jiwa atau kira-kira 39 persen penduduk di Indonesia.

Banyak karyawan dan staf terkena PHK di berbagai bidang seperti sektor perbankan, transportasi, hiburan, sektor bangunan dan sektor lain. Jumlah penduduk yang kecanduan zat/bahan berbahaya naik, begitu pula dengan

pasangan yang bercerai, tingkat penderitaan depresi, bunuh diri dan anak-anak yang dibuang. Oleh karena itu, menguatkan jaring pengaman sosial tradisional dan membangun jaring pengaman sosial ala negara barat, solidaritas keluarga besar dan kepercayaan beragama yang tercermin oleh adanya dukungan organisasi agama dan masyarakat harus dilakukan. Hal itu sangat penting untuk mengatasi kesulitan ekonomi sosial bangsa Indonesia.

Pada umumnya Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) pemerintah ditambah program Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti Palang Merah Indonesia (PMI).

Indonesia ialah sebuah negara dengan jumlah penduduk sekitar 209 juta yang pertumbuhannya 1,6 persen pertahun dan GDP per kapita nominal US\$ 460 atau menurut standar daya beli Bank Dunia, GDP (PPP) US\$ 2.940. Dengan devaluasi valuta kira-kira sebesar 700 persen, sangat sulit untuk pedagang-pedagang yang melakukan transaksi luar negeri. Semua sektor ekonomi mengalami kesulitan kecuali ekspor hasil bumi seperti bahan mentah, hasil laut dan hasil hutan.

Dengan ekonomi yang berkembang dengan baik, lapangan kerja baru bisa tersedia. Pertumbuhan ekonomi dengan angka 1 persen akan menyerap tenaga kerja 400,000 orang, menurut perkiraan ahli ekonomi. Dengan kontraksi sebesar 1 persen, pengangguran bertambah sebesar itu pula. Sekarang masih ada keadaan kekuatiran-kekuatiran terhadap investasi yang belum benar-benar terjadi.

Jaring Pengaman Sosial

Program kompensasi atau jaring pengaman sosial biasanya dibagi dalam 2 kategori besar. Pertama, program pengembangan kesempatan kerja. Kedua, program pelayanan sosial termasuk pelayanan kesehatan, pendidikan dan program

subsidi. Hal penting yang termasuk program itu adalah upaya pencegahan (*prevention*), pemberdayaan (*empowerment*) dan penanggulangan (*tackling*).

Observasi yang dilakukan dalam studi lapangan tentang bantuan dan pemberdayaan masyarakat. Itu untuk mengetahui program apa yang bermanfaat bagi kelompok yang dapat dicapai secara maksimal, untuk mengatasi keraguan masyarakat terhadap program-program dan membesarkan hati sebagian masyarakat yang ingin mempunyai usaha sendiri.

Tiga kelurahan di 3 kota dipilih untuk studi lapangan ini. Kota Malang yang dekat Ibu kota provinsi suatu tempat industri, tempat hiburan dan pariwisata serta agro industri. Kota Manado, yang jauh dari pusat pemerintahan, dekat perbatasan Philipina, suatu kota dengan industri perkebunan, industri perikanan dan parawisata. Yogyakarta, pusat kebudayaan dan seni Jawa, dengan industri kerajinan, industri perhotelan serta jasa dan pendidikan.

Kelurahan Lesanpuro di Kota Malang, Jawa Timur

Distribusi beras Palang Merah Indonesia. Penulis bertemu krew distribusi dan membantu menaikkan barang ke truk kecil, dalam program kerjasama PBB dan Palang Merah Internasional. Karung plastik yang berisi 10 kg beras diberikan kepada rakyat dan proses verifikasi sangat transparan. Penumpang truk, memberikan kesempatan kepada penulis untuk berkunjung ke beberapa rumah masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan tersebut. Program ini, distribusi beras, merupakan suatu program terbaik yang penulis saksikan.

Operasi Pasar Khusus (JPS-OPK). Badan Urusan Logistik (Bulog) bertanggung jawab terhadap transportasi ke kelurahan untuk membongkar beras sesuai dengan jumlah masyarakat yang tidak mampu. Kuantitas yang diterima masyarakat tergantung pada dana subsidi pemerintah yang diterima oleh Bulog. Waktu penulis datang ke kantor kelurahan, setiap kepala keluarga yang tidak

mampu mendapat 20 kilogram, tetapi penulis mendengar meskipun subsidi sudah turun, mereka hanya mendapatkan 10 kilogram saja di bulan Mei 2000. Untuk dapat beras tersebut, mereka harus memenuhi kriteria; Keluarga Pra Sejahtera Alasan Ekonomi (KPS), Keluarga Sejahtera 1 (KS-1) dengan alasan ekonomi atau Keluarga Rawan Pangan lainnya dengan kriteria yang belum di daftar.

Proyek Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDM-DKE). Seluruh masyarakat dengan kriteria ekonomi serta sosial yang cocok boleh berpartisipasi dalam proyek ini. Tenaga kerja yang direkrut dari pengangguran daerah ini dibayar antara 6 sampai 10 ribu rupiah, tergantung kualifikasinya. Proyek yang dilakukan adalah; memperbaiki selokan dan saluran got, sanitasi serta memperbaiki prasarana daerah. Program non-fisik yang dilakukan di kelurahan adalah usaha industri kecil rumah tangga, usaha bengkel, tambal ban, membuat tempe, menjahit, menjual dan membuat jamu, dagang keliling, menjual susu, jualan kue, jualan rujak dan lain-lain. Jumlah pinjaman mikro kredit tergantung dari kegiatan dan jumlah orang yang terlibat usahanya.

Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Program kerjasama Bank Dunia dan Pemerintah Indonesia yang dikelola secara independen. Penulis berkunjung di suatu warung makanan yang berjalan dengan mikro kredit yang menyediakan P2KP. Warung itu meminjam 3 juta rupiah untuk kemajuan usaha mandiri. Uang itu dipakai untuk membeli alat-alat dan untuk modal kerja.

Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan (JPS-BK). Untuk mendapatkan informasi tentang proyek itu penulis bertemu dengan dokter di puskesmas Arjuno. Masyarakat yang tidak mampu mempunyai Kartu Sehat (KS) dan mendapatkan pelayanan secara gratis dari pusat kesehatan kecil disini. Di Malang disuatu kelurahan, ada tanaman jamu sebagai sosialisasi obat alami yang murah. Di puskesmas dijelaskan tentang tambahan makanan yang diberikan kepada ibu dan

anknya yang tidak mampu, saran gizi kepada orang yang belum cukup sehat, imunisasi bayi, ibu hamil, anak SD dan wanita usia subur.

Kelurahan Tuminting di kota Manado, Sulawesi Utara

Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS), dilaksanakan di Madrasah Ibtidaiyah Al-Hijrah Murid. Mereka dapat menu variasi yang sesuai dengan saran dinas kesehatan. Ada Binyolos, suatu variasi yang diperuntukkan bagi 220 anak sekolah. Binyolos itu mengandung 306 kalori dan 55 gram protein. Pada tanggal 17 Mei 2000, dana dari pemerintah belum turun dan program itu berhenti. Pada umumnya 3 kali sampai 5 kali seminggu makanan tambahan diberikan, tergantung jadwal atau program dan dana yang diterima. Di Sekolah Dasar Negeri 72 ada 150 murid. Program PMT-AS dilaksanakan selama uang yang diterima sekolah dari pusat. Pada waktu penulis datang, murid-murid menerima makanan yang dibungkus dalam daun pisang.

Beasiswa dan Dana Bantuan Operasional (DBO). Di SDN 72 ada 2 murid kelas 4, satu putra dan satu putri yang menerima beasiswa. Mereka menerima Rp 60.000 per 6 bulan lewat weselpos di kantor pos selama satu tahun. Dana Biaya Operasional (DBO) belum didapat di sekolah tersebut.

Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan (JPS-BK) Untuk kegiatan ini, memilih puskesmas Teling Atas. Untuk memperbaiki gizi, Program Makanan Tambahan (PMT) telah dilaksanakan dan bermanfaat bagi 200 jiwa termasuk ibu hamil, bayi dan anak. Untuk pemberantasan penyakit menular sejumlah 60 orang, penderita TB Paru dan Malaria, telah dilayani di puskesmas. Disini pasien dibantu dengan informasi obat tradisional dari Tanaman Obat Keluarga (TOGA). Misalnya sakit amandel, gatal-gatal memakai daun sirih, untuk sakit pinggang diobati dengan kumis kucing dan kaki kuda.

Operasi Pasar Khusus (OPK). Waktu penulis di Sulawesi Utara (Sulut),

belum diketahui adanya distribusi beras OPK, tetapi pejabat Dolog menjelaskan bahwa di bulan April 2000, 10 kg beras akan dijual kepada kepala keluarga (KK) sesuai dengan subsidi, yaitu sebanyak 226.000 KK yang mendapatkan manfaatnya. Disamping menjual beras, Dolog juga melakukan aktifitas sebagai pembeli gabah dari petani.

Kelurahan Terban di kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta

Program makanan tambahan anak sekolah dilakukan di SD Muhammadiyah Sagan dibiayai secara pribadi. Murid mendapat makanan tiap siang.

Beasiswa dan Dana Bantuan Operasional (DBO) di SD ini terdiri dari dua jenis. Beasiswa SD Muhammadiyah dan beasiswa pemerintah (JPS). Di bawah beasiswa JPS, 13 murid di kelas IV dan V mendapatkan Rp 60.000 per semester selama 2 semester. Beasiswa SD Muhammadiyah swasta dari yayasan, diberikan kepada 30 siswa yang tidak mampu sebesar Rp 25.000 setiap bulan dan berlaku selama 6 tahun. SD Muhammadiyah Sagan tahun 2000 ini mendapatkan Rp 1.742.000 dana bantuan operasional (DBO) untuk perlengkapan mengajar (alat peraga) seperti peta dan bola kaki, perbaikan gedung dari pemerintah.

Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan (JPS-BK). Untuk itu puskesmas Gondokusuman II dikunjungi, dimana 592 KK atau sekitar 2770 orang mendapatkan pelayanan kebidanan dan perawatan rujukan secara gratis. Puskesmas mengeluarkan dana kepada sukarelawan untuk menyalurkan pemberian makanan tambahan (PMT) kepada balita gizi buruk, ibu hamil dan ibu menyusui. Salah satu pelayanan lain adalah perawatan bagi orang yang menderita penyakit TB paru.. Obat tradisional dipakai untuk mengatasi penyakit ringan.

Operasi Pasar Khusus (OPK). Beras 50 kg/karung yang dibongkar di gudang kelurahan diserahkan kepada RW untuk dibagikan kepada kepala keluarga (KK)

yang berhak menerima.

Pelayanan LSM Palang Merah Indonesia. Mereka mendistribusikan beras gratis dan juga menyediakan poliklinik dan klinik gigi yang buka setiap hari kerja untuk membantu rakyat yang tidak/belum mampu secara gratis.

Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), memberikan pinjaman bergulir pada kelompok usaha sendiri untuk memberdayakan masyarakat dengan menyuntik dana (modal) sesuai kelayakan usaha. Contoh usulan proyek kredit ialah: pedagang kaki lima (khususnya makanan), kerajinan bunga, warung makan di rumah, industri rumah, bengkel, dan lain-lain. Bunga kredit tetap (*flat rate*) 18 persen pertahun.

Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDM-DKE). Program ini hampir sama dengan P2KP, tetapi dalam PDM-DKE masyarakat tidak dikenai sanksi berat jika gagal mengembalikan kredit yang telah diperolehnya.

Kesimpulan Dari Hasil Pengamatan Studi Lapangan

Penulis berkunjung ke daerah yang mempunyai program-program Jaring Pengaman Sosial pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Jumlah program-program itu tidak selalu sama dan jenis serta ukurannya tergantung kebijaksanaan pemerintah atau pengelola LSM. Kelihatannya dampak krisis moneter berdampak sangat buruk bagi karyawan dan buruh yang mata pencahariannya di bidang industri dan jasa.

Maka program distribusi beras gratis sebagai program makanan sangat efektif dan transparan seperti JPS bantuan kesehatan di puskesmas dan program memberdayakan masyarakat.

Kualitas Pendidikan dan Latihan (DIKLAT) belum cukup baik dan metode lain harus dicari yang dapat bermanfaat bagi moral dan kebudayaan pejabat. Ketika kebutuhan keuangan tidak dipenuhi dan mereka tidak puas, peluang KKN menjadi sangat besar. Perilaku ini akan berpengaruh terhadap orang lain, yaitu menjadikan seperti lingkaran setan. Lingkaran setan ini sulit diberantas, kecuali ada sanksi/hukuman yang berat sehingga kebocoran tidak akan terulangi. Hal ini terungkap dalam beberapa artikel-artikel dan surat kabar yang jurnalis ketemukan. Mayoritas kegiatan memberdayakan di kota-kota di Jawa nampaknya lebih sempurna dari pada program yang dilakukan di Sulut.

Penulis berpendapat bahwa semangat kerja sukarelawan Palang Merah Indonesia lebih tinggi atau lebih baik dibandingkan dengan Pegawai Negeri. Pada umumnya semangat staf puskesmas sangat tinggi dalam memperbaiki kesehatan dan meningkatkan gizi masyarakat yang telah digariskan dalam program JPS. Akan tetapi sangat disayangkan apabila ada berita buruk di surat kabar, sebab hal itu berlawanan dengan kenyataan dan apa yang telah dilakukan oleh para sukarelawan PMI, staf puskesmas dan pihak lain yang merendahkan semangatnya.

Beberapa program belum terlaksana disebabkan uang yang sudah dialokasikan untuk program ini belum turun dari pemerintah.

Beberapa orang Indonesia yang tidak mampu, ingin mendapat bantuan tetapi mereka skeptis dan gelisah mencari bantuan secara aktif, sebab mereka kecewa dengan sikap pilih kasih oknum pejabat. Kesan ini menyebabkan orang tidak selalu percaya pada manfaat-manfaat program JPS.

Saran

Ketrampilan lebih lanjut bagi staf yang terlibat dalam program akan meningkatkan kualitas etik / kebudayaan dan pengetahuan sumber daya manusia di dalam melaksanakan program tersebut. Kantor kelurahan adalah pusat

informasi bagi masyarakat tetapi belum digunakan secara optimal/cukup dalam menyebarkan informasi.

Dalam era reformasi masyarakat menuntut keterbukaan, tetapi sekarang masih sulit untuk mendapatkan keterangan tentang pengeluaran keuangan, aturan yang menjelaskan pendapatan dan belanja setiap tingkat pemerintahan termasuk kelurahan.

Dewasa ini Indonesia sudah memasuki era "Masyarakat Orientasi Konsumsi" (*Consumption Orientated Society*). yang mungkin mendorong perbuatan yang tidak sesuai tugas pejabat. Pemerintah harus memperbaiki transparansi, sistem yang terbuka dalam pelayanan masyarakat yang baik. Rencana biaya dan batz waktu maksimum untuk menyelesaikan proses pelayanan, dalam hal mengeluarkan izin atau hal-hal lain, yang dilakukan oleh dinas atau departemen harus jelas. Selanjutnya diberlakukan usaha dan peraturan untuk membantu pegawai didalam melaksanakan itu dengan cara menyadarkannya sesuai dengan tugasnya, serta harus mempunyai sarana yang memadai dan upah pegawai negeri yang disesuaikan dengan tugasnya.

Subsidi yang dikeluarkan harus sampai pada kelompok yang disasaran dengan cara mengeluarkan kupon kepada orang yang perlu dibantu saja. Sanksi yang ketat/berat harus diterapkan terhadap orang yang terlibat dan inspeksi serta audit yang independen harus dilakukan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.

- Aspek-aspek Sosial Krisis Moneter

Indonesia adalah sebuah negara yang dasar ekonominya masih agraris, tetapi dengan trend industrialisasi. Sebagian besar penduduk Indonesia bertempat tinggal di pedesaan sebanyak kurang lebih 65 persen dan sisanya tinggal di perkotaan. Menurut prakiraan penduduk tenaga kerja tahun 1995-2025 dari Demographic Institute FEUI, Jakarta, menyebutkan bahwa tingkat urbanisasi penduduk Indonesia akan meningkat menjadi 52 persen di 20 tahun ke depan. Sekarang sudah banyak orang desa yang tinggal tidak jauh dari kota mencari pekerjaan di kota untuk meringankan beban ekonomi keluarganya dengan tuna kehidupan sebab, penduduk pedesaan belum banyak yang mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan. Banyak penduduk pindah dari desa ke kota menjadi penduduk musiman atau menetap untuk mencari kesempatan bekerja di kota untuk membantu perekonomian keluarganya. Penduduk musiman yang berasal dari desa mempunyai kebudayaan mudik (pulang kampung) pada saat tertentu, misalnya pada hari raya 'Idul Fitri dan Natal. Dengan demikian urbanisasi merupakan suatu proses perubahan yang alami dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Proses ini terkait erat dengan kenyataan

bahwa meningkatnya pertumbuhan ekonomi negara¹, sebab hubungan pedesaan dan perkotaan di Indonesia tidak terlampau jauh dan perubahan yang terjadi di kota mempunyai dampak bagi masyarakat desa, baik dampak yang menguntungkan maupun yang merugikan.

Krisis Moneter, atau yang dikenal dengan istilah “Krismon”, ialah sebuah kemacetan aliran keuangan antara lain, dimulai sekitar bulan Juli 1997 di Indonesia. Itu kelihatannya, memanifestasi pertama di Korea Selatan, dan menyebar ke Asia Tenggara. Selama 10 tahun sampai Juli 1997 rata-rata pertumbuhan ekonomi hampir 8 persen per tahun yang berhenti dengan tiba-tiba. Sekitar waktu tersebut, Indonesia tidak menderita krisis moneter saja, tetapi juga ditambah dengan krisis ekonomi dan krisis politik serta moral yang hebat sekali dan belum diselesaikan oleh pemerintah yang baru. Pendapat beberapa pengamat ahli bahwa untuk menyelesaikan krisis itu kemungkinan memakan waktu satu generasi. Krisis-krisis itu bukan menyebabkan kesulitan keuangan saja, tetapi mempengaruhi pola pikir politik, sosial dan terbukanya jiwa khas bangsa Indonesia atau moralitas bangsa. Sekarang waktu reformasi menjadi kenyataan di Indonesia dan ide-ide demokrasi, hak-hak asasi, kebebasan dan keadilan yang sebelum waktu itu belum terdiskusi tetapi sekarang keinginan masyarakat dikeluarkan dan disiarkan melalui media cetak maupun elektronik.

Mantan Presiden Soeharto telah memimpin negara Indonesia selama 32

¹ Prijono Tjiptoberijanto 2000 halaman 32

tahun. Pada masa itu, yang dikenal sebagai Orde Baru suatu paradigma pembangunan ekonomi memunculkan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi lebih memilih strategi “*trickle down effect*”², sebagai permulaan yang baik dalam pembangunan ekonomi nasional. Sebuah suasana diciptakan oleh pemerintah dengan tindakan pilih kasih kepada golongan atau lapisan masyarakat tertentu. Alokasi kesempatan kepada golongan tertentu itu, mengakibatkan kurangnya kesempatan perkembangan masyarakat luas, secara ekonomis, sosial maupun politik. Khususnya kelompok yang paling bawah mengalami kesulitan kebutuhan primer (pangan, sandang dan papan). Manipulasi data untuk memberi keuntungan kepada suatu kelompok pernah terjadi, misalnya di sebuah puskesmas seorang dokter mengekspresikan keprihatinan tentang akurasi data statistik yang menunjukkan status sosial pra-sejahtera sudah teratasi di beberapa kabupaten, pada akhir rezim Orde Baru.

Pada era reformasi, pemerintah lebih menempatkan rakyat lapisan bawah sebagai titik awal pembangunan ekonomi nasional yang merubah keadaan sosial masyarakat langsung di tingkat bawah dan sampai sekarang beruntung dari sistem ekonomi “*trickle down effect*” yang tidak cocok. Paradigma baru, pola pikir dari era reformasi, minta partisipasi aktif atau sistem “*bottom up*” untuk memberdayaan masyarakat dalam meningkatkan penghasilan.

Strategi Orde Baru untuk memperluas kesempatan masyarakat yang dekat

² Wahyudi 1999, halaman 46

dengan pejabat adalah para pejabat tinggi dan pejabat terkait mengadakan koordinasi pengeluaran izin serta tindakan-tindakan dalam pertanggungjawabannya yang sesuai bidangnya masing-masing. Hal itu menyebabkan masyarakat yang punya koneksi dapat meningkatkan posisi ekonominya. Praktek itu masih lancar dan menurut *Political and Economic Risk Consultancy (PERC)*³ lembaga yang berkantor pusat di Hongkong, dalam survei menyebutkan Indonesia masih menjadi negara terkorup. Dalam skor dari 0 sampai 10, Skornya rating 9.88 dan melebihi India 9.50, Vietnam 9.20, China 9.22 dan Fillipina dengan skor 8.67. PERC angket, sebagai jajak pendapat tengah ekspatriat di seputar Asia Tenggara dan dikeluarkan setiap tahun.

Indonesia adalah sebuah masyarakat yang makin lama mengarah pada suatu "Masyarakat Orientasi Konsumsi" (*Consumption Orientated Society*). Tindakan itu mendorong perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), karena orang cenderung untuk hidup di atas kemampuan sebab itu norma-norma yang sudah menjadi biasa harus dilawan⁴.

Pemerintah sebelumnya telah mencoba menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat, tetapi masih belum terselesaikan permasalahan tersebut di atas. Permasalahan itu, tidak hanya masalah penghasilan saja, tetapi juga permasalahan yang diakibatkan oleh tingkat kualitas pendidikan, kesehatan dan status sosial

³ Jawa Pos, 2000, halaman 28

⁴ Ismail Saleh, halaman 8 Kompas 6 Maret 2000

masyarakat. Dalam *paper Asian Development Bank (ADB)*⁵ menghimbau agar supaya dimensi sosial tidak dilupakan pemerintah. Perekonomian akan mampu tumbuh tanpa perbaikan dan perluasan pendidikan, kesehatan dan jaring pengaman sosial.

Sejak 1969 Pembangunan Nasional, menurut Statistik Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik bulan Juni 1999, ternyata kemajuan daya beli masyarakat dan program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan secara intensif: seperti program Pengembangan Keluarga, program Tabungan Keluarga Sejahtera serta Kredit Usaha Keluarga Sejahtera yang dicanangkan oleh pemerintah pada akhirnya akan mengurangi jumlah penduduk miskin di Indonesia. Pemerintah dalam meningkatkan upaya pengembangan program usaha mandiri serta program lain, memperlihatkan hasil yang cukup baik.

Pada tahun 1976 penduduk miskin di Indonesia diperkirakan 39 persen. Kemudian pada tahun 1996 sudah berkurang sampai 9 persen. Jumlah tersebut berkurang dari 55 juta jiwa menjadi 23 juta jiwa saja. Angka itu meningkat sampai 47 juta jiwa di tahun 1998 dan menurut Tim Penyusun Kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan dalam Laporan Pelaksanaan, yang terbit pada bulan Juni 1999, jumlah meningkat lagi sampai 79 juta jiwa atau kira-kira 39 persen penduduk di Indonesia. Itu seharusnya dijelaskan bahwa angka yang diluarkan pemerintah seperti di atas

⁵ Flores Chong, 2000, halaman 25

kurang dipercaya oleh kelompok pengamat-pengamat sebagai angka yang akurat.

Salah satu definisi kemiskinan yang digunakan, mengacu pada kebutuhan pangan minimum 2100 kkal per kapita per hari dan itu ditambah dengan kebutuhan non-makanan termasuk transportasi sekolah serta kebutuhan dasar rumah tangga dan individu. Penduduk yang tidak memenuhi kebutuhan itu dikategorikan sebagai penduduk miskin. Tetapi definisi kemiskinan yang dipakai tergantung instansi. Misalnya, Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) memakai definisi: orang yang tidak mampu dengan penghasilan kira-kira kurang dari Rp 250.000 per bulan. Suatu definisi membedakan rakyat dalam bagian Keluarga Pra-sejahtera, Keluarga Sejahtera 1 dan tingkat atas.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia bertambah disebabkan oleh dampak krisis yang terkenal dengan istilah "Krismon". Dampaknya terhadap kapasitas mencari hidup sangat dahsyat, khususnya di kota besar yang dikenal dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) diakibatkan perusahaan mengalami kerugian atau memperkecil kegiatan. Hal itu kemungkinan mereka tidak mampu mengandalkan Jaring Pengaman Sosial yang tradisional. Jaringan di kota masih kurang kuat dan bantuan dari LSM serta dinas atau departemen tidak cukup untuk mengatasi kesulitan yang dialami. Banyak karyawan dan staf terkena PHK di bidang industri jasa seperti sektor perbankan, transportasi, hiburan, sektor pembangunan dan sektor lain.

Sektor perbankan yang salah memberi kredit, dikeluarkan untuk proyek yang kurang menguntungkan sehingga akibatnya perusahaan yang terkena krismon dan omsetnya yang kecil menyebabkan kurang cukup untuk membayar angsuran dan beban suku bunga kredit. Sebabnya rasio kapasitas keuangan yang dimiliki dan kredit yang dikeluarkan tidak seimbang atau sesuai dengan peraturan, sebab itu sejumlah bank dipaksa tutup atau dilikuidasi dan karyawannya dikenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Karyawan tersebut tidak kehilangan sumber penghasilan saja, tetapi jaring pengaman sosial dan kemungkinan untuk meningkatkan atau memperbaharui ketrampilan dan bidang sosial lainnya juga ikut hilang.

Di sektor transportasi, mengakibatkan banyak perusahaan mengalami kerugian atau menderita kekurangan penghasilan akibat tingkat pendapatan angkutan turun, baik jumlah penumpang maupun barang yang menyebabkan beberapa hubungan transportasi diputus. Pendapatan yang kurang cukup untuk pemeliharaan armada kendaraan atau memperbaharui armada ditunda. Kualitas maupun kapasitasnya menurun sedangkan jumlah pemakai jasa tersebut berkurang.

Di sektor industri yang mengalami pertumbuhan ekonomi lebih dari 10 persen selama 10 tahun sampai bulan Juli 1997, dampak krisis keuangan sangat dahsyat. Misalnya harga kendaraan naik hampir 3 kali lipat. Sebelum tahun 1997 diawali dengan optimisme permintaan pasar kendaraan akan mencapai 400.000.

Keadaan ternyata berbalik dan di tahun 1998 hanya 58.000 kendaraan dipasarkan dan tahun ini jumlah yang diproduksi 94.000 saja. Tahun 1998 kapasitas industri automotif yang dipakai totalnya hanya mencapai 15 persen, dan permintaan tenaga kerja sesuai dengan tingkat produksi.

Menurut surat kabar harian International Herald Tribune, tanggal 18 Januari 2000, analisis yang dikeluarkan Bank Dunia dan Unicef krisis keuangan di Asia menyebabkan penderitaan keluarga dan anak-anak semakin berat. Jumlah anak yang bekerja naik, jumlah penduduk yang kecanduan zat/bahan berbahaya naik juga. Jumlah pasangan yang bercerai, tingkat penderitaan depresi, bunuh diri dan anak-anak yang dibuang naik. Surat kabar harian tersebut mengeluarkan saran bahwa lebih baik menguatkan jaring pengaman sosial tradisional dari pada membangun jaring pengaman sosial ala negara barat. Kehidupan gotong royong, khusus di daerah pedesaan di Indonesia, masih banyak dilakukan. Seperti solidaritas keluarga besar dan kepercayaan beragama yang tercermin oleh adanya dukungan organisasi agama dan masyarakat. Hal itu sangat penting untuk mengatasi kesulitan ekonomi sosial bangsa Indonesia.

Keuntungan pemerintah untuk menjelaskan bahwa usaha untuk mengatasi krisis itu, program-program harus dilakukan secara efektif sebab dana belum cukup dan jumlah orang yang tidak mampu masih sangat banyak. Program Jaring Pengaman Sosial yang sudah ada, diperbaiki dan ditujukan kepada masyarakat yang perlu. Program-program itu ditambah program Lembaga Swadaya

Masyarakat juga seperti Palang Merah Indonesia (PMI). Juga ada program yang dilakukan mahasiswa Strata Satu (S1) yang belum lulus sarjana yang dikenal sebagai program Kuliah Kerja Nyata (KKN). Misalnya seorang informan menjelaskan, bahwa suatu kelompok mahasiswa mengorganisir distribusi paket sembako yang bermanfaat untuk suatu desa.

Article 25 para 1 of the Universal Declaration of Human Rights states that: " Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and his family, including food."

Pasal 25 paragraf 1 dari Deklarasi Dunia Hak Manusia menyatakan bahwa: " Siapapun punya hak atas tingkat kehidupan cukup untuk kesehatan dan kesejahteraan kepada diri sendiri dan keluarganya, termasuk makanan."

- Aspek-aspek Ekonomi

Semua negara di dunia punya jumlah penduduk yang tidak mampu atau mengalami kesulitan memenuhi kebutuhannya, itu juga dialami di Indonesia. Indonesia adalah sebuah negara dengan ekonomi yang sedang berkembang. Menurut Asia Week isu 24 Maret 2000, Indonesia ialah sebuah negara dengan jumlah penduduk sekitar 209 juta yang pertumbuhannya 1,6 persen dan GDP per kapita nominal US\$ 460 atau menurut standar daya beli Bank Dunia, GDP (PPP) US\$ 2.940.

Di tahun 1997 nilai dollar Amerika Serikat mencapai Rp 15.000,00 Dari nilai tukar sebelum krisis sebesar Rp 2000,00. Sekarang nilainya sekitar Rp 7.500,00 sampai Rp 9000,00. Dengan devaluasi valuta sebesar 700 persen, merupakan sangat sulit untuk pedagang-pedagang melakukan transaksi luar negeri. Rencana produksi tergantung permintaan konsumen dan harga penjualan dipengaruhi oleh tingkat harga. Semua sektor ekonomi mengalami kesulitan kecuali ekspor hasil bumi seperti bahan mentah, hasil laut dan hasil hutan.

Seorang informan menceritakan kepada saya bahwa petani Sulawesi sangat untung dengan jatuhnya Rupiah, sebab coklat yang diekspor mereka di pasar dunia dicatat dalam dollar Amerika, sehingga keuntungannya naik. Ada anekdot tentang petani coklat di Sulawesi Tengah yang keuntungannya sangat besar. Mereka membeli kulkas walaupun belum ada listrik di kampung.

Menurut wartawan Flores Chong dalam surat kabar harian The Australian, tanggal 14 Maret 2000, menjelaskan bahwa sebuah paper dari Asian Development Bank (ADB) yang memfokuskan pada ekonomi Indonesia dan beberapa negara lain yang terkena krisis moneter tahun 1997. Hal ini diyatakan bahwa negara Indonesia belum sampai tingkat ekonomi sebelumnya dan prakiraan perkembangan GDP tahun 1999 akan mencapai 0.23 persen pada tahun 2000 perkembangan akan menjadi 3,9 persen. Walaupun demikian restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan sangat pelan-pelan apabila dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya, harapan ADB bahwa konsumsi swasta dan tingkat

investasi akan naik disebabkan restrukturisasi perusahaan dan utangnya yang masih macet, akan berlanjut.

Tingkat pengangguran yang tinggi dan daya beli yang rendah sangat membahayakan keamanan masyarakat. Sesudah Presiden Soeharto mundur telah terjadi beberapa kerusuhan di Jawa, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan Sulawesi Tengah dan Selatan, Pulau Bantam, Kepulauan Maluku, Lombok dan tempat lain. Disamping alasan ekonomi, mungkin alasan lain yaitu manusia dengan perut kosong itu bahaya sekali. Menurut Harian Kompas dalam artikel, 24 Februari 2000, konfirmasi diterima dari Menteri Tenaga Kerja Bomer Pasaribu, bahwa 36 juta warga masyarakat kini menganggur. Dalam benak pengamat politik, mereka berpikir bahwa angka yang dikeluarkan pemerintah itu merupakan estimasi rendah. Artikel itu menyebutkan bahwa jumlah kaum pengangguran sudah mencapai sekitar 50 juta jiwa atau sekitar 25 persen dari seluruh penduduk termasuk bayi dan lanjut usia.

Keadaan itu mungkin menyebabkan ledakan sosial dan semoga pemerintah tidak tinggal diam. Sampai saat ini dan juga diakui Menteri Tenaga Kerja (Mennaker), seluruh upaya pasti belum mengatasi soal pengangguran. Semua program-program untuk meningkatkan daya beli masyarakat sangat tergantung pada kondisi keuangan pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat yang terlibat. Apabila ekonomi berkembang dan kemampuan perusahaan naik, maka penerimaan pemerintah juga naik, keadaan daya beli pegawai, karyawan dan

buruh bisa memperoleh manfaat.

Dengan ekonomi yang berkembang dengan baik, lapangan kerja baru bisa tersedia. Tingkat efisiensi di Indonesia masih rendah. Pertumbuhan ekonomi dengan angka satu persen akan menyerap tenaga kerja 400,000 orang, menurut prakiraan ekonomiwan. Dengan kontraksi sebesar satu persen pengangguran bertambah sebesar itu pula.

Permasalahan sekarang sangat rumit dan ahli-ahli merasakan bahwa peluang untuk melanjutkan ekonomi Indonesia kurang besar. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun 2000 dialokasikan subsidi untuk mengurangi ongkos bahan pokok untuk orang yang tidak mampu dan akan menyalakan kemajuan ekonomi. Misalnya, terutama ada subsidi bahan bakar minyak, pangan, listrik dan beberapa hal lain. Sekarang ada kekuatiran-kekuatiran terhadap investasi yang belum benar-benar terjadi, walaupun prospek pemulihan ekonomi Asia pada umumnya saat ini sedang mencapai titik balik, menurut Bank Dunia⁶.

Jaring Pengaman Sosial

Apa yang sudah dijelaskan di atas, krisis ekonomi yang sudah menimbulkan dampak yang begitu dahsyat yang getarannya masih di rasakan

⁶ Wartawan Jawa Pos 23 Maret 2000 hal 19

sampai waktu sekarang. Menurunnya kegiatan perekonomian menyebabkan jumlah keluarga pra-sejahtera dan keluarga sejahtera I akan naik. Sejumlah masyarakat yang di kelas atas, juga terkena dampak pengangguran, sehingga daya beli seluruh masyarakat semakin menurun. Tanggal 17 Mei 2000 disiarkan bahwa prakiraan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,5 persen dari Badan Pusat Statistik mungkin rendah dan menurut ahli ekonomi asing pertumbuhan ekonomi mungkin akan mencapai 5 persen.

Saat ini ada jumlah besar keluarga yang kurang mampu. Mereka tidak punya ketrampilan yang cocok atau modal untuk bangkit lagi. Oleh sebab itu, banyak anak putus sekolah, kuantitas dan kualitas pangan yang tidak sesuai kebutuhan minimal serta kesulitan perawatan kesehatan, seperti ketidakmampuan berobat atau dapat konsultasi atau saran dari puskesmas serta rumah sakit. Ongkos ikut Keluarga Berencana (KB) menjadi berat dan kemungkinan keputusan itu akan berakibat fatal pada waktu yang akan datang.

Masyarakat juga terkena dampak inflasi yang menyebabkan naiknya harga barang yang diimpor, sementara buruh, petani dan karyawan dengan ketrampilan terbatas, yang jumlah pencari kerja naik akibat krisis pengangguran, tidak mampu untuk memperbaiki keadaan keuangan.

Program kompensasi dan jaringan biasanya dibagi dalam 2 kategori besar yang masing-masing mempunyai banyak kegiatan. Pertama program

pengembangan kesempatan kerja. Kedua, program pelayanan sosial termasuk pelayanan kesehatan dan pendidikan dan program subsidi untuk mereka yang sangat menderita. Hal penting yang termasuk program itu adalah upaya pencegahan (*prevention*), pemberdayaan (*empowerment*) dan penanggulangan (*tackling*). Pemerintah Indonesia dan LSM, keduanya dengan bantuan dari luar negeri terlibat sejumlah program memberantas kesulitan sebagian masyarakat yang lemah.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa masalah yang nanti akan dibahas. Permasalahan penting dari studi ini dirumuskan sebagai berikut:

- Apa dampak krisis moneter terhadap jumlah masyarakat yang tidak mampu dan perlu bantuan untuk dapat kebutuhan dasar?
- Apa program efektif yang sebaiknya dilakukan oleh instansi pemerintah supaya sosialisasi di masyarakat lebih meningkat?
- Bagaimana cara agar program pemberdayaan untuk mewujudkan potensi supaya lebih jelas?

- Bagaimana cara supaya sukarelawan dan pegawai yang terlibat dalam program, bisa lebih dihormati dan dipercaya?

1.3 Tujuan Studi Lapangan

Dari rumusan masalah diatas dan pokok bahasaan dan observasi yang dilakukan dalam studi lapangan tentang bantuan dan pemberdayaan masyarakat dalam mencari hidup primer, tujuan studi lapangan adalah:

- Untuk mengetahui program apa yang bermanfaat bagi kelompok sasaran secara optimal.
- Untuk mengatasi keragu-raguan masyarakat terhadap program yang dilakukan.
- Untuk meningkatkan moral atau semangat masyarakat seperti pekerja sukarela yang terlibat mengelola dan melaksanakan program tertentu.
- Untuk menemukan sistem penyampaian dana atau kegiatan langsung kepada orang yang membutuhkan yang sangat efektif.
- Untuk membesarkan hati sebagian masyarakat yang punya keinginan untuk usaha sendiri dan masyarakat yang melakukan segala usaha untuk mencari lapangan kerja baru.

1.4 Kegunaan Studi Lapangan

Studi ini mengenai prospek pengembangan sebagian besar masyarakat besar, yang belum dapat memenuhi kebutuhan primer mereka. Hal ini boleh dapat digunakan untuk menjelaskan atau menjadi suatu proses sosialisasi kepada orang yang sudah melebihi tingkat kebutuhan itu, juga untuk memperluas daya tarik tentang kelompok konsumsinya yang belum sesuai dengan standar hidup sederhana dan sehat.

Studi lapangan ini boleh dapat digunakan juga sebagai alat untuk melanjutkan kebudayaan jujur, adil dalam proses menumbuhkan dan memberdayakan masyarakat.

1.5 Metodologi Studi Lapangan

Studi lapangan yang dilakukan penulis, diantaranya kota Malang (Jawa Timur), Manado (Sulawesi Utara) dan kota Yogyakarta (Daerah Istimewa Yogyakarta) pada bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2000.

Proses perizinan penelitian dari pemerintah daerah dan wawancara dengan pihak yang terkait program JPS menghabiskan banyak waktu dan terkadang sulit untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Sebab itu, penelitian ini lebih cocok memfokuskan beberapa program JPS saja, dan membatasi wawancara dan pengamatan pada program semi LSM sampai satu program selain itu dilakukan

pembatasan studi sampai satu program LSM – PMI. Studi itu dibagi kedalam 2 kajian. Berdasarkan buku-buku acuan, artikel-artikel media dan dan kedua, studi lapangan ke beberapa kota di beberapa provinsi.

Pertama, studi ini terdiri dari penelitian yang bersumber pada artikel berita tentang kegiatan ekonomi dan sosial selama waktu penelitian dan sebelumnya. Artikel yang diterbitkan di surat kabar seperti koran Kompas, Media Indonesia, Jawa Pos, Kedaulatan Rakyat, Bernas, Manado Pos, Malang Pos dan lain-lain. Publikasi yang diterbitkan pemerintah pusat, provinsi, kota dan kelurahan, serta buku-buku referensi dari perpustakaan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).

Kedua, studi lapangan degan melakukan pengamatan terhadap beberapa progam JPS yang dilaksanakan pemerintah maupun lembaga swasta untuk kebutuhan studi lapangan, sebab itu, 3 lokasi di tiga kota dari 3 provinsi dipilih, dengan karakterastik jauh berbeda. Menurut pendapat penulis pilihan kota Malang, Manado dan Yogyakarta sangat bermanfaat sebab aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, iklim dan keadaan kebudayaan wilayah punya konsekuensi penting. Aspek seperti yang tadi disebut, dapat mengembangkan potensi yang ada agar dapat dilaksanakan baik ekonomi maupun sosial untuk memajukan kesejahteraan penduduknya.

1.6 Batasan Studi Lapangan

Jaring Pengaman Sosial yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga swasta, adalah kegiatan yang sangat berbeda dari segi-segi geografi, memenuhi kebutuhan masyarakat dan pengelolaannya.

Menurut artikel di surat kabar, jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tidak kurang dari 600. Jumlah dan jaringan komunikasi dari pusat sampai sukarelawan atau pegawai di lapangan, yang tugasnya memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat yang tidak mampu, adalah rumit sekali. Waktu untuk melakukan studi ini juga dibatasi, demikian juga untuk menjelaskan kegiatannya, suatu lembaga dipilih oleh penulis untuk studi lapangan ini yang dilakukan di 3 daerah yang jaraknya, satu sama lainnya berjauhan.

Administrasi pemerintah terlibat melakukan proyek JPS sangat bertingkat terdiri dari 7 atau 8 tingkat yang terlibat; pemerintah pusat, pemerintah propinsi, kota, kecamatan, kelurahan/desa – di tambah dengan tingkat Dusun -, Rukun Warga (RW) dan terakhir unit administrasi terkecil Rukun Tetangga (RT). Terdapat masalah, bahwa program JPS pemerintah, yang dilakukan lembaga swasta juga, tidak dilakukan di seluruh wilayah. Suatu program terbatas kegiatannya pada suatu tempat, beberapa tempat atau propinsi saja.

Sebab masalah yang disebut diatas, penulis mencoba memfokuskan kegiatan tingkat pada bawah, bagian yaitu dari rantai sebelum diterimakan kepada masyarakat yang perlu dan berhak menerimanya.

Observasi program JPS pemerintah dan swasta dibatasi di tingkat kantor kelurahan, sekolah dan puskesmas, secara umum. Pengamatan itu mencakup beberapa program JPS saja, tergantung kota dan programnya.

BAB II

Program Pengembangan Masyarakat

2.1 Pengembangan Jaring Pengaman Sosial (JPS)

JPS merupakan sejenis program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan sejenis program re-distribusi dana dari kontribusi pajak, sumbangan dan dari sumber lain, serta dikembangkan melalui kegiatan swasta seperti koperasi, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi bantuan. Pelaksanaan program itu lebih cocok dengan menggunakan beberapa prinsip-prinsip⁷ dasar atau karakteristik yang dianut. Mengikuti prinsip itu sangat penting agar program itu dapat berjalan dengan baik. Itu lebih cocok untuk mencapai sasaran dan karakteristik untuk membangun, memberdayakan dan memakai sumber daya manusia. Program yang mempunyai cita-cita untuk perlindungan dan penanggulangan. Sasarannya adalah masyarakat yang terlemah seperti keluarga miskin, keluarga pra-sejahtera dan keluarga sejahtera I. Partisipasi masyarakat harus lebih ditingkatkan untuk mewujudkan potensi mereka dan melibatkan swasta dan lembaga swadaya masyarakat.

Sudah ada beberapa contoh yang dilakukan di Indonesia dalam membantu kelompok yang perlu bantuan. Untuk menyebarluaskan kesempatan kepada masyarakat lapisan bawah di seluruh Tanah-Air, menyekolahkan anak-anak

⁷ Prof. Dr. Haryono Suyono halaman 5

mereka untuk mencerdaskan bangsa. Dana bantuan seperti beasiswa akan dapat mengatasi kesulitan seperti putus sekolah, atau memperbaiki kuantitas dan kualitas bahan pendidikan seperti buku-buku, alat tulis dan sebagainya.

Untuk melindungi sumber daya manusia penyediaan pelayanan kesehatan penting sekali dan juga berguna untuk mengontrol jumlah penduduk. Penyuluhan Keluarga Berencana (KB) harus disosialisasikan dengan baik. Kesempatan atau dukungan pinjaman dan penyuluhan usaha dapat mewujudkan potensi kewiraswastaan melalui kredit usaha kecil yang mengeluarkan dana dengan angsuran dan jaminan yang sesuai. Suatu kelompok dengan ketrampilan individu yang berbeda dapat saling bekerja sama sesuai dengan kealihannya.

Untuk bantuan orang yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) disediakan lapangan kerja sementara. Hal ini seperti yang dilakukan di waktu perekonomian yang sangat kacau sekitar tahun 1930. Proyek umum yang dilakukan masih bermanfaat bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Proyek infrastruktur yang memperbaiki lingkungan, seperti renovasi atau pembangunan saluran got serta selokan, sanitasi, memperbaiki jalan, reboisasi, memperbaiki atau bangunan jasa dinas sampah, mengembalikan bahan (daur ulang) dan lain lain, merupakan proyek mengurangi pengangguran.

Program pangan sebagai sebuah program kerja yang dapat dilakukan khusus untuk memenuhi kebutuhan makanan. Khususnya, untuk memenuhi

kebutuhan sembako, program subsidi makanan disediakan oleh organisasi. Hal ini itu akan mengurangi tekanan inflasi dan mengatasi kalaparan. Di desa program agroindustri atau agribisnis dapat dilakukan dengan bimbingan para tenaga sarjana. Itulah kesempatan untuk membantu petani dengan konsep-konsep baru yang akan meningkatkan prosedurnya dan menguatkan posisinya dalam internasionalisasi pasar. Hal ini akan bermanfaat bagi masyarakat yang harus bersaing dengan organisasi didalam dan diluar ASEAN.

Tenaga-tenaga sarjana yang jumlahnya cukup besar untuk melakukan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) atau Kulian Kerja Usaha (KKU) diajak mengikuti program tersebut. Program yang menitik-beratkan kemandirian harus menerima latihan atau bimbingan untuk memperbesar kesuksesan untuk melanjutkan usahanya dengan baik. Kesempatan untuk bekerja dalam bidang usaha akan memudahkan mengatasi kesulitan yang ditemukan dalam lapangan pekerjaan. Masyarakat yang mempunyai cacat sosial, para orang tua atau yang mempunyai masalah-masalah lainnya seperti pemulung serta anak jalanan juga harus ditolong.

Sosialisasi program atau kegiatan yang dilaksanakan kelompok harus mencakup seluas-luasnya, sebab kesempatan untuk memperbaiki statusnya sebenarnya tanpa diskriminasi suku agama ras antar-golongan (SARA) serta diskriminasi tempat tinggal masyarakat di kepulauan. Kesempatan harus dibatasi oleh keinginan individu saja. Hal itu lebih sesuai dengan prinsip pemberdayaan

masyarakat dengan bentuk partisipasi masyarakat tahap pertama dari waktu kelahiran program, mereka mempunyai keinginan yang bermanfaat dan memperkuat kesuksesannya.

Program yang dikembangkan oleh pemerintah untuk masyarakat dikenal dengan JPS dan pusat pengelolaannya dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) yang pendanaannya terbatas sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah / Provinsi (BAPPEDA). Beberapa instansi seperti Dinas, Kelurahan Puskesmas, Rumah sakit Bulog dan lain lain terlibat menyebarkan jasanya kepada orang yang tidak mampu.

2.2 Program Program yang Dilaksanakan Pemerintah

Program pangan

- **Operasi Pasar Khusus Beras (OPK)**

Operasi Pasar Khusus (OPK) atau juga disebut Operasi Pak Beras, dilakukan sebagai suatu program “Jaring Pengaman Sosial (JPS) sebagai intervensi dalam bidang ketahanan pangan. Harga sembako melonjak sejak 1997 dan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan (utama beras) semakin menurun. OPK dilakukan sebagai program untuk mengatasi kesulitan yang diciptakan oleh mekanisme pasar dan program itu membantu

langsung orang yang memerlukan dapat akan memenuhi kebutuhan beras keluarganya. Konsumsi beras per kapita per tahun kira-kira 130 kilogram., dan gaji pegawai negeri juga ditambah dengan sejumlah beras, oleh sebab itu dapat memenuhi kebutuhan dasar yang sangat penting.

Data BKKBN merupakan basis untuk memperkirakan jumlah yang akan memanfaatkan program itu dan mendapat beras murah di desa atau kelurahan. Penyaluran beras bersubsidi itu melalui Sub-Dolog dan sasaran penerima direvisi setiap 3 bulan oleh pemerintah daerah. Lapisan masyarakat yang mendapat beras yang disubsidi adalah; Keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera 1, keluarga itu sudah memenuhi kebutuhan primer secara minimal dengan bobot pengkatagoriannya lebih ditekankan pada alasan ekonomi. Keluarga Rawan Pangan, adalah keluarga (khususnya di perkotaan dan sekitarnya) yang memenuhi salah satu atau lebih kriteria berikut ini: makan kurang dari dua kali sehari, anggota keluarga sakit tetapi tidak mampu lagi berobat ke fasilitas kesehatan, tidak mampu mengkonsumsi makanan berprotein sekali seminggu, memiliki anak yang putus sekolah karena alasan ekonomi, pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal. Keluarga miskin yang hilang Kartu Tanda Penduduk (KTP) masih mendapat manfaat dari program itu. Keluarga Sejahtera II (KS II), KS III dan KS III atas, tidak boleh ikut program ini sebab penghasilan mereka cukup.

OPK sudah berjalan selama anggaran 1998/1999 di seluruh propinsi di Indonesia dan beberapa perbaikan sudah dilakukan sejak program ini dilaksanakan. Dewasa ini penyebaran informasi atau sosialisasinya melibatkan instansi terkait dan masyarakat umum secara luas dengan media massa TV, surat kabar radio lokal serta kelompok kegiatan sosial, keagamaan melalui papan pengumuman di desa serta kelurahan. Ketepatan sasaran penerima dan penyediaan mekanisme penanganan ditangani oleh Unit Pengaduan Masyarakat (UPM).

Kelompok sasaran yang ingin dicapai adalah Keluarga Pra-sejahtera, Keluarga Sejahtera I dengan alasan ekonomi atau keluarga yang belum terdaftar tetapi rawan pangan. Di seluruh Indonesia jumlahnya kira-kira sekitar 14,2 juta kepala keluarga. Hanya ketika kelompok disebut diatas memperoleh beras yang disubsidi dengan harga Rp. 1000,00/kg. Kuantitasnya tergantung dana yang disediakan pemerintah. Mereka mendapatkan 20 kg, 15 atau 10 kg sebulan. Alasan mendapatkan hal tersebut dikarenakan: makanan belum cukup, tidak mampu, memiliki anak yang putus sekolah, pekerja yang terkena PHK. Menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) jumlah masyarakat diklasifikasi yang tidak mampu sekitar 14,2 juta kepala keluarga (KK) Angka itu ditambah dengan jumlah keluarga rawan pangan yang belum terdaftar BKKBN tetapi masih masuk kriteria miskin.

Sekarang ini Dolog mendrop karung beras sesuai kuantitas jumlah anggota terdaftar yang boleh mendapat beras subsidi program Operasi Pasar Khusus, di kantor kelurahan atau tempat yang sesuai. Uang untuk kuantitas itu dibayar langsung pejabat kelurahan kepada satgas Dolog yang didistribusi ke Rukun Tetangga (RT), unit administrasi terkecil di Indonesia, terdiri dari beberapa keluarga di suatu tempat atau Rukun Warga (RW) unit administrasi yang terdiri dari beberapa RT. Sistem distribusi ini masih rawan terhadap kebocoran, tetapi masih cukup baik.

- Pengembangan Pembibitan dan Budidaya Ayam Buras di Pedesaan.

Program ini untuk mengembangkan kegiatan peternakan. Alokasi dana khusus program ini dilakukan di 16 provinsi saja. Menurut informan penulis, Kerja Kuliah Nyata (KKN) universitas terlibat langsung dan memberikan pelatihan orang desa untuk mengelola dan memelihara ayam tersebut. Juga ada dana dari Program Penanggulangan Kota dan Pedesaan, yang meminjamkan dana untuk proyek tersebut.

- Pengembangan Tambak Rakyat

Program ini dilakukan di 10 provinsi dan informasi yang diterima belum cukup untuk menjelaskan sifat dan manfaatnya.

Program Pengaman Sosial Bidang Pendidikan

- **Beasiswa dan Dana Bantuan Operasional (DBO) dan Pendidikan Tinggi (DIKTI)**

Krisis ini berpengaruh terhadap kapasitas guru dan anak mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) Sekolah Menengah Atas (SMA), Dewasa ini SMU dan SMK, pelayanan pendidikan tinggi. Dana ini khusus diberikan bagi mahasiswa yang berprestasi akademik. Hal ini akan mendorong dan mempertahankan semangat belajar mereka dan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi. Mudah-mudahan itu bermanfaat dan dapat menyelamatkan aset bangsa sebagai sumber daya manusia untuk masa depan.

Beasiswa Kerja Mahasiswa, diberikan kepada mahasiswa yang bekerja paruh waktu selama perguruan tinggi untuk mendorong prestasi akademis mereka. Kerja seperti asisten dosen, asisten laboratorium, peneliti, petugas perpustakaan dan koperasi adalah beberapa contoh lapangan kerja. Mereka dapat beasiswa sebesar Rp. 60.000 per mahasiswa sebulan. Beasiswa Bantuan Penyelesaian Tugas Akhir (BPTA) Rp. 350.000 per bulan diberikan kepada mahasiswa perguruan tinggi untuk menambah jumlah dana kepada mahasiswa yang bersangkutan. Dana Bantuan Operasional (DBO) Bantuan itu digunakan perguruan tinggi untuk memperbaiki dan pemeliharaan fasilitas dan bahan-bahan yang dipakai dalam proses belajar mengajar.

Dana BOP adalah salah satu sumber dana rutin bagi sekolah untuk mengurangi murid-murid yang putus sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan dasar.

Pengaman Sosial Bidang Kesehatan

Program ini untuk mengatasi masalah masyarakat rawan dan mengembalikan status gizi dan kesehatan. Kepala desa atau lurah mengecek kriteria yang penting untuk mengeluarkan Kartu Sehat kepada anggotanya. Anggota yang memenuhi kriteria itu antara lain : keluarga yang tidak bisa makan 2 kali sehari atau tidak mampu mengobati anak atau anggota yang kena PHK massal, anggota anak putus sekolah karena masalah ekonomi diberikan kartu untuk pengobatan dan pelayanan secara gratis.

Pelayanan kesehatan dasar dan rujukannya gratis untuk pelayanan termasuk rawan berencana dan rawat jalan dan inap. Pelaksanaannya dilakukan di puskesmas, posyandu dan tempat lain termasuk rumah tangga dan rumah sakit. Khusus untuk Ibu hamil dan bayinya ada beberapa pelayanan yang dilakukan di puskesmas rumah sakit dan tempat lain. Bagi ibu hamil dan bayi yang menderita kurang gizi mereka diberi makanan tambahan. Untuk pemberantasan penyakit menular, diprioritaskan untuk penderita TB paru dan malaria. Kegiatan imunisasi ditujukan bagi bayi, ibu hamil, calon pengantin, anak SD dan wanita subur.

- **Jaring Pengaman Sosial Bidang Sosial (JPS-BS)**

Program ini merupakan bagian dari Pengaman Sosial Bidang kesehatan. Akibat pemutusan hubungan kerja (PHK), kehilangan pekerjaan, berkurangnya daya beli dan melonjaknya harga barang-barang, menyebabkan anak-anak mencari nafkah dan makan di luar rumah. Program itu meliputi antara lain kesempatan kepada anak jalanan untuk mendapat beasiswa (SD, SLTP dan SLTA), tambahan pelatihan ketrampilan dan makanan, konseling kepada orangtua, anak, rumah singgah dan pemeliharanya. Menurut aturan beasiswa paling tinggi sejumlah Rp 540.000,00 per tahun diberikan kepada anak, dan pelatihan ketrampilan yang putus sekolah sebesar Rp 500.000,00 per tahun dan pemberian makanan bagi anak jalanan adalah sebesar Rp 3.000,00 untuk sekali makan. Program itu dilakukan di 13 kota besar, termasuk Yogya dan Malang, dan anggaran yang disediakan adalah Rp 100,7 milyar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) dan Asian Development Bank (ADB).

- **Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)**

Program ini diberikan kepada murid untuk meningkatkan status gizi dan membesarkan hati untuk datang ke sekolah bagi anak yang tidak mampu. Program itu dimulai tahun 1996 dan diterima dengan baik, oleh sebab itu kelompok diharapkan dapat menyebarluaskan program tersebut. Sekarang, sasarannya berumur antara 7 sampai 12 tahun murid-murid miskin SD, MI dan pondok

pesantren negeri dan swasta. Makanan tambahan diberikan 3 kali seminggu selama 108 hari belajar dan disiapkan ibu-ibu rumah tangga dan lain-lain, menggunakan hasil pertanian lokal, diharapkan dapat bermanfaat bagi pemberdayaan sumber daya lokal. Uang bantuan makanan sebesar Rp 400,00 per unit makan untuk kawasan barat Indonesia dan Rp 550,00 untuk kawasan timur Indonesia. Pada bulan Januari dan Juli, juga pemerian tablet obat cacing (sebesar Rp 650,00 untuk 2 tablet). Untuk mengelola dan membiayai pelatihan program tertentu juga diberikan bantuan dana. Dewasa ini kira-kira 60,636 sekolah dan jumlah murid sebanyak 9,809,179 yang dijadikan sasaran program. Hal ini meliputi seluruh propinsi di Indonesia. Dana total yang dialokasikan untuk program adalah sebesar 550 milyar Rupiah.

Penciptaan Lapangan Kerja Produktif

- Pada Karya Sektor Pekerjaan Umum Cipta Karya (PKSPU-CK)

Akibat krisis moneter yang menjadi krisis ekonomi jumlah penganggur meningkat dari 5.3 juta pada tahun 1997 menjadi 13.8 juta pada tahun 1998. Dalam menanggulangi kesulitan tersebut diluncurkanlah program ini untuk mengatasinya sementara dan meningkatkan kualitas prasarana dan sarana perkotaan. Sasarannya adalah penganggur miskin di kota. Laki-laki maupun perempuan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) tanpa ketrampilan yang berusia antara 15 sampai 55 tahun. Prioritas utama adalah masyarakat yang

didaftar terlebih dahulu. Mereka terlibat dalam kegiatan proyek-proyek pembangunan, operasional dan perawatan prasarana. Contohnya antara lain kegiatan seperti konstruksi dan peningkatan penyediaan air bersih, fasilitas pembuangan limbah, cair dan padat, drainase dan pengendalian banjir, jalan lingkungan, jembatan kecil dan jalan setapak, fasilitas umum seperti pasar, lapangan olah raga dan posyandu. Fasilitas lingkungan perumahan nelayan seperti tempat pelelangan ikan, dermaga kecil dan rumah tinggal seperti drainase dan kebun, termasuk kegiatan seperti pembersihan dan pengecekan sebagai program pemeliharaan prasarana.

Program itu melibatkan Dinas Pekerjaan Umum di tingkat kabupaten dan kota dan pengelolaannya dilakukan Unit Pengelolaan Proyek, tugasnya mengkoordinasikan seluruh tahapan pelaksanaan program di wilayahnya. Pimpinan Bagian Proyek yang bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan keuangan, dan terlibat dalam proses lelang dan perjanjian dengan kontraktor dan Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang terdiri dari 3 sampai 5 orang yang dipilih oleh masyarakat dan bertanggung jawab sebagai penghubung kontraktor dengan tenaga kerja atau masyarakat dan mengupayakan penyelesaian permasalahan dan mungkin terjadi.

Dewasa ini proses penyempurnaan dibandingkan tahun anggaran sebelumnya. Hal ini diperbaiki dalam bidang penyebarluasan informasi yang lebih intensif dan transparan. Lokasi kegiatan dan alokasi dana tergantung pencari

kerja yang mendaftarkan diri. Dan sasarannya adalah tenaga kerja perempuan, khususnya yang terlibat dalam program ini, sehingga jumlahnya menjadi lebih representatif dan seimbang dengan seluruh kelompok yang ditarget.

Dana Pemberdayaan Masyarakat

- Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDM-DKE)

Program ini dilakukan pada waktu pemerintahan presiden Habibie. Informasi yang didapat penulis sangat kurang, tetapi masih dijalankan diseluruh propinsi dan dana terkecil di terima pemerintahan DKI Jakarta, walaupun program besar dan 792.009 Juta rupiah dialokasikan oleh pemerintah pusat. Dana yang diterima di tingkat kelurahan dimanfaatkan untuk sarana prasarana memperbaiki lingkungan wilayah dan melakukan proyek industri rumah tangga. Kebanyakan proyek itu terdiri dari makanan, minuman dan kerajinan. Dana diberikan untuk memberdayakan masyarakat dengan usaha mandiri, seperti usaha kolompok saja. Contohnya peternakan, perikanan, budidaya ayam buras, cacing lumbricus, belut, jangkrik ikan nila dan lele. Bagian pembangunan industri dan unit jasa, seperti tambal ban, menetik dan lain-lain.

Menurut informan lurah di Yogyakarta, program itu mirip Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dan dalam program itu,

masyarakat yang mendapat kredit kecil untuk membangun usaha sendiri bertanggung jawab mengembalikan uang yang dipinjamkan organisasinya. Menurut informan program P2KP lebih baik dari DM-DKE, jumlah proyek dan sirkulasi keuangan, persentase yang tidak dikembalikan tinggi dan tanggung jawab program itu tidak jelas dibandingkan P2KP.

2.3 Program Kerjasama Bank Dunia dan Pemerintah

- **Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP)**

Program itu adalah kerjasama Bank Dunia dan Pemerintah Indonesia. Sekitar 100 juta dolar Amerika Serikat dialokasikan untuk proyek itu yang terdiri dari dana sebesar 90 persen dari Bank Dunia serta dana sisanya dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun ini. Dewasa ini program ini hanya dilakukan di pulau Jawa sebab dampak krisis ekonomi terbesar di Jawa.

Kebijaksanaan umum program ini untuk menanggulangi persoalan kemiskinan struktural serta persoalan yang diakibatkan oleh krisis ekonomi. Kegiatannya bukan hanya kegiatan reaktif tetapi juga bersifat strategis untuk perkembangan masyarakat di masa depan.

Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan mensyaratkan usulan tentang kegiatan yang dilakukan oleh kelompok tertentu. Pembimbing akan

membantu kelompok itu dengan memberi saran bagaimana mengisi formulir tertentu dan mengelola urusan keuangan selama proyek berlangsung dan angsuran yang belum dipenuhi. Dana kredit merupakan aliran dana yang dimanfaatkan sebagai modal usaha produktif, pembangunan sarana dan prasarana dasar lingkungan, serta meningkatkan sumber daya manusia.

Dana untuk modal produktif yang dikeluarkan merupakan dana pinjaman bergulir. Artinya, kredit itu yang dikembalikan kelompok yang terlibat usaha produktif, dapat dipakai lagi untuk proyek baru yang diusulkan kelompok lain. Sementara, dana pembangunan sarana dan prasarana dasar lingkungan merupakan dana bantuan langsung dan tidak dikembalikan, tetapi mereka bertanggung jawab melakukan pengembangan dan pemeliharaan lebih lanjut. Proyek kedua, pembangunan sarana dan prasarana dalam konteks ini, berupa pembangunan yang baru dan perbaikan yang lama.

Seluruh kegiatan termasuk pengelolaan pengembangan usaha, serta pembangunan prasarana, pelaksanaan dan pemeliharaannya harus dilakukan dengan pendekatan kepada kelompok-kelompok tertentu. Partisipasi aktif masyarakat itu mungkin bersifat padat karya dan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan kelompok itu dan memperkuat kelembagaannya.

Sasaran P2KP adalah mempercepat upaya penanggulangan ketidakmampuan dan memperkuat daya beli masyarakat. Dana dipinjamkan

kepada masyarakat untuk pengembangan kegiatan usaha mandiri dan diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru. Dana hibah untuk memperbaiki sarana dan prasarana dasar lingkungan hanya akan dilaksanakan dengan melibatkan seluruh wilayah tertentu dan pemeliharaan proyek itu adalah tanggung jawab seluruh warga masyarakat. Semua aktifitas harus terbuka dan siap diperiksa.

Beberapa kata kunci penting dalam melakukan aktivitas telah disebut diatas. Proyek itu didasarkan pada tindakan yang membesarkan hati masyarakat seperti mereka punya sendiri kunci mengembangkan lingkungannya dan kesempatan mencari hidup sesuai kapasitas dan keinginannya. Sebab itu kata dan tindakan harus sesuai dengan istilah seperti demokrasi, partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan desentralisasi. Masyarakat yang terkait harus memperoleh keadilan, kejujuran, emansipasi, kemitraan, dan kesederhaan.

2.4 Distribusi Beras Palang Merah Indonesia

Dalam program kerjasama antara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) World Food Program dan Palang Merah Internasional, satu kapal berisi beras dari Vietnam dibongkar langsung di Surabaya, dan diangkut ke cabang-cabang Palang Merah di mana-mana. Jumlah yang didapat oleh cabang tertentu, tergantung jumlah masyarakat yang didaftar sebelum program distribusi beras berlangsung. Program rencana distribusi beras sudah berlangsung bulan Juli 1999 hingga

Oktober 2000 atau lebih lama, tergantung kondisi dan alokasi dalam anggaran PBB dan Palang Merah.

Dengan program ini ditambah pula program pemerintah OPK, bagi orang yang miskin dapat beras. Prioritas diberikan menurut kriteria yang sangat ketat supaya program ini sampai pada masyarakat secara benar, dan program ini berjalan dengan penuh kesungguhan untuk orang yang benar-benar tidak mampu. Sasarannya adalah orang-orang miskin dan cacat, yatim piatu, lansia dan janda.

BAB III

JAWA TIMUR

3.1. Pendahuluan - Kota Malang

Malang adalah kota yang terletak di Jawa Timur (Jatim), 90 kilometer selatan dari Surabaya dan terletak di kaki gunung Semeru. Ketinggian tanah dari permukaan laut 450 meter dengan suhu udara berkisar antara 25⁰C sampai 35⁰ C dan sekitar 897 kilometer dari Ibukota Negara. Kota itu dulu terkenal Negeri Swiss dari Asia Tenggara. Ekonomi kota itu mengandalkan pendapatan dari hasil tanah dan apel Malang terkenal di seluruh Indonesia, industri kretek, pabrik mesin kecil, pendidikan, markas-markas tentara dan pariwisata lokal yang mayoritas pengunjungnya dari Surabaya, yang menciptakan suatu industri perhotelan besar sebagai jasa yang berkembang saat ini.

3.2. Sifat-sifat Kelurahan Lesanpuro

Untuk melakukan studi lapangan penulis memfokuskan pada satu kelurahan yang terlatak di pinggir selatan kota Malang yang tidak jauh dari ladang dan hutan. Kelurahan Lesanpuro terletak di kecamatan Kedungkandang dan luasnya 354,883 hektar. Luas industri sebesar setengah hektar saja, seperti luas pertokoan. Perkantoran dan pasar desa juga seperempat hektar walaupun pengukuran tanah wakaf sebesar 3 hektar, tidak ada tanah sawah di kelurahan tetapi tegalan sebesar

152,300 hektar. Hanya beberapa hektar digunakan untuk tanaman jagung dan ketela pohon, sayur-sayuran seperti sawi, tomat, kacang panjang, terong, buncis lombok dan mentimun. Kira-kira 15 hektar digunakan untuk perkebunan kelapa dan buah-buahan seperti pisang, pepaya, jeruk dan durian. Kegiatan peternakan terdiri dari pemeliharaan ayam kampung, 2.221 ekor, ayam ras 6.678 ekor, itik 359, kambing 367 ekor dan sapi biasa 278 ekor. Jumlah penduduk di kelurahan 13.719 orang separuh laki haki dan separuh perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) 3.015 dengan rata-rata, suatu unit keluarga terdiri dari 4 anggota. Mayoritas penduduk mata pencahariannya karyawan swasta dan sejumlah 3570 orang. Jumlah Pegawai Negeri Sipil 478 dan ABRI 92 orang. Jumlah pedagang 211, petani 352 dan buruh tani 69, sementara jumlah tukang 29 dan pemulung 8 orang.

Tingkat kemajuan diperkirakan pengamat dengan cara melihat, sejumlah barang yang dipunyai masyarakat di kelurahan ini: telepon umum sejumlah 15 buah, pemilik pesawat telepon 170, pemilik pesawat TV 1.355 buah dan 678 pesawat radio saja. Pemilik Parabola sejumlah 49 orang. Transportasi juga merupakan salah satu kriteria untuk mengukur kekayaan kelurahan. Jumlah sepeda 701 buah, 31 becak dan 180 gerobak. Sepeda motor 230 dan 25 mobil pribadi 6 truk dan 9 mikrolet.

3.3. Program JPS di Kelurahan Lesanpuro

Sebagaimana telah disebutkan pada bagian sebelumnya, program JPS terdiri

dari 12 program. Tahun anggaran 1999 / 2000 kotamadya mendapatkan 5 program dan Operasi Pasar Khusus dan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan juga di lakukan. Ini ditambah dengan program distribusi beras gratis melalui Palang Merah Indonesia cabang Malang.

Dari program ini penulis menyaksikan beberapa program di kelurahan yang mengikut, program OPK, P2KP dan program Palang Merah.

- Distribusi Beras Gratis LSM Palang Merah Indonesia

Distribusi beras Palang Merah dilakukan oleh cabang Malang di jalan Buring. Selama dua hari, 12 -13 Maret 2000 pagi-pagi, penulis bertemu krew distribusi dan ikut membantu membagi muatan suatu truk kecil dengan sekitar satu setengah ton beras yang didistribusikan dalam program kerjasama antara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (World Food Program) dan Palang Merah Internasional kepada orang tertentu. Hanya masyarakat yang mempunyai kartu merah muda boleh berpartisipasi dalam program ini, artinya hanya masyarakat yang terdaftar yang mendapatkan selama program berlangsung. Penyaringan seperti itu sangat efektif.

Selama program berjalan, beberapa hari dalam seminggu suatu truk kecil yang dimuati oleh para sukarelawan, sejumlah karung plastik yang berisi 10 kg beras sesuai dengan drop hari itu. Masyarakat yang mempunyai kartu sudah tahu

kapan truk Palang Merah Indonesia akan datang ke kantor kelurahan (termasuk kantor kelurahan Lesanpuro). Tiap kali truk tiba di kelurahan, dengan sabar, disitu berkumpul rakyat yang sudah menunggu dengan kartu merah muda. Tanggal dengan tandatangan atau sidik jari dicatat di kartu itu. Disamping itu ada bukti dan verifikasi yang sangat transparan siapa yang mendapatkan beras gratis. Tergantung wilayah, kira-kira 10 sampai 30 orang masyarakat bertemu dengan truk yang berisi beras, kemudian memberikan kesempatan kepada penulis untuk berkunjung ke beberapa rumah masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan tersebut. Berkat program ini masyarakat yang tidak mampu mencari uang masih dapat makanan. Program distribusi beras merupakan suatu program terbaik yang penulis saksikan. Penggunaan sukarelawan seperti itu yang mempunyai keinginan membantu masyarakat menjadi suatu aspek yang dapat meningkatkan kejujuran dan keadilan dan menjadikan proses distribusi itu sangat efektif.

- Ketahanan Pangan- Operasi Pasar Khusus (JPS-OPK)

Suatu pagi, penulis melihat program itu berlangsung di kelurahan Lesanpuro. Badan Urusan Logistik (Bulog) bertanggungjawab terhadap transportasi ke kelurahan untuk membongkar beras sesuai dengan jumlah masyarakat yang tidak mampu dan yang berhak mendapatkan beras yang disubsidi oleh pemerintah. Umumnya beras dibongkar sekali dalam sebulan ke kantor kelurahan. Kuantitas yang diterima masyarakat tergantung dana subsidi pemerintah yang diterima oleh Bulog. Waktu penulis datang ke kantor, tiap kepala

keluarga yang tidak mampu mendapat 20 kilogram tetapi penulis mendapat informasi jumlah subsidi sudah turun dan mereka mendapatkan 10 kilogram saja di bulan Mei 2000. Mereka yang memenuhi syarat untuk menerima beras, adalah mereka menerima kupon khusus. Bagi keluarga kurang mampu yang tidak bisa membayar dengan uang tunai, maka kepada penanggungjawab distribusi di lapangan memberi toleransi selambat-lambatnya dua minggu.

Untuk seleksi atau sasaran keluarga penerima manfaat program ini, beberapa kriteria harus dipenuhi keluarga itu. Mereka harus memenuhi kriteria⁸ Keluarga Pra Sejahtera Alasan Ekonomi (KPS), Keluarga Sejahtera I (KS-I) dengan alasan ekonomi atau Keluarga Rawan Pangan lainnya dengan kriteria yang belum di daftar pada data Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Distribusi beras secara teknis yang bertanggungjawab adalah lurah dan proses distribusinya di kantor kelurahan ke Kepala Keluarga kurang jelas. Beberapa kendaraan tiba dikantor dan penulis percaya itu diangkut ke Rukun Warga untuk didistribusikan langsung kepada keluarga.

- **Projek Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDM-DKE)**

⁸ Menteri NP dan H & BUL, *Pedoman Umum dan Petunjuk Pelaksanaan Distribusi Operasi Pasar Khusus Beras*, halaman 3

Program ini adalah alokasi dana fisik dan non-fisik. Seluruh masyarakat dengan kriteria ekonomi serta sosial yang cocok boleh berpartisipasi dalam proyek ini.

Saat penulis berkunjung di kelurahan Lesanpuro tidak ada aktivitas program yang jalan, tetapi ada dokumentasi tentang programnya. Suatu program fisik terlibat perbaikan sarana makam dan jalan RW.03, biaya keseluruhan digunakan keperluan pengadaan batu, pasir dan upah pekerja. Tenaga kerja yang direkrut dari pengangguran daerah ini dibayar antara 6 sampai 10 ribu rupiah, tergantung kualifikasinya. Proyek lain yang dilakukan dalam proyek (PDM-DKE) di daerah ini adalah memperbaiki selokan dan saluran got, sanitasi dan memperbaiki prasarana daerah. Program non-fisik yang dilakukan di kelurahan adalah usaha industri kecil rumah tangga, usaha bengkel, produk suttle cock, tambal ban, membuat tempe, menjahit, service elektro, menjual jamu, dagang keliling, menjual susu, membuat jamu, toko, menjual minyak tanah, menjual krupuk, membuat es, menjual bakso, menjual ayam, menjual tempe, las, jualan kue, jualan rujak dan lain-lain. Jumlah pinjaman tergantung dari kegiatan dan jumlah orang yang terlibat usahanya. Jumlah tertinggi 3 juta sampai yang terendah 93 ribu rupiah.

- Proyek Penganggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)

Program kerjasama Bank Dunia dan Pemerintah Indonesia yang dikelola

independen, tetapi ruang sosialisasi dan administrasi terletak di kantor kelurahan. Penulis berkunjung di suatu warung makanan dan minuman yang berjalan dengan mikro kredit yang menyediakan P2KP. Warung ini mendapat pinjaman 3 juta rupiah untuk kemajuan usaha mandiri 3 anggota dan akan bermanfaat bagi sekeluarga. Dengan uang itu 1,5 juta rupiah dipakai untuk membeli alat-alat dan sisanya digunakan untuk modal kerja dan membeli barang stok makanan dan minuman.

- **Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan (JPS-BK)**

Untuk mendapatkan informasi tentang proyek itu penulis bertemu dengan dokter di puskesmas Arjuno. Masyarakat yang tidak mampu dan mempunyai kartu sehat boleh mendapatkan pelayanan secara gratis dari pusat kesehatan kecil disini. Dalam program (JPS-BK) ada alokasi dana khusus untuk angkutan kepada masyarakat yang tidak mampu datang ke puskesmas. Di daerah ini jumlah anggota 4899 dan jumlah orang tidak mampu 1847. Khusus untuk mengatasi masalah kesehatan kelompok itu, alokasi dana keluarga itu sebesar Rp 10.000 dalam anggaran dinas kesehatan. Itu untuk membayar obat-obatan yang tidak ada di apotek umum di puskesmas, dan biaya pelayanan lain.

Untuk menurunkan biaya obat-obatan, saran dari puskesmas diberikan kepada masyarakat yang merasa nyaman minum obat dari Tanaman Obat Keluarga. (TOGA) misalnya obat tradisional Temulawak, terkenal bermanfaat

bagi pasien yang menderita penyakit hepatitis. Di Malang di suatu kelurahan, mereka menanam beberapa jenis jamu sebagai sosialisasi obat alami yang murah.

Khusus untuk membantu ibu hamil, ibu bersalin, bayi dan anak-anak dengan kondisi kesehatan yang peka, kegiatan pelayanan dilaksanakan di puskesmas. Dokter di puskesmas menjelaskan tentang tambahan makanan yang diberikan kepada ibu yang tidak mampu. Saran-saran tentang gizi ditujukan kepada orang yang belum cukup sehat, imunisasi bayi, ibu hamil, anak SD dan wanita usia subur.

BAB IV

SULAWESI UTARA.

4.1. Pendahuluan - Kota Manado

Manado, Ibukota Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Ekonomi kota itu mengandalkan pendapatan dari hasil tanah, rempah-rempah seperti cengkeh, pala dan vanili. Hasil pohon kelapa (kopra) dan hasil laut khususnya ikan jenis Tuna yang diexport. Tidak ada banyak pabrik. Industri kecil terdiri dari industri untuk proses produk hasil agraris. Ada juga industri pelayanan perikanan dan kapal. Daerah itu menarik bagi pariwisata dan perhotelan telah dibangun di pulau ini. Batu karang banyak didapat dan sangat luar biasa juga tanaman nasional dengan beberapa jenis hewan yang dilindungi oleh hak. Ini sangat tertarik bagi para wisatawan lokal maupun internasional. Banyak hasil alam diexport, harganya tergantung pasar dunia, oleh sebab itu, anjloknya rupiah memperbesar harga hasil bumi yang dicatat dalam dolar Amerika. Hubungan laut, darat dan udara lokal maupun internasional menjadikan tempat itu mudah dikunjungi. Ada hubungan pesawat langsung ke Jawa, Singapore dan Philipina dan pelabuhan Bitung, 50 km dari Manado, adalah sebuah pelabuhan internasional dengan berbagai fasilitas dan kawasan industri.

Dari data yang didapat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), alokasi dana program JPS yang dilaksanakan dalam 8 bidang dan

terlibat 9 program. Hanya 5 program yang bisa berjalan sedangkan 4 program belum jalan disebabkan oleh permasalahan teknis. Program JPS Beasiswa Dikdasmen, DBO Dikdasmen, DOP SD / MI, PMTAS, dan OPK Beras.

4.2 Sifat-sifat Kelurahan Tuminting

Kelurahan terletak di kecamatan Molas di Kotamadya Manado di propinsi Sulawesi Utara. Jarak ke kotamadya hanya 5 kilometer dan umumnya jalan-jalannya cukup baik. Luasnya 324 hektar dan ketinggian tanah dari permukaan laut 200 meter saja serta suhu udara sekitar 29⁰C. Jumlah penduduk terdiri dari 7766 orang laki-laki dan 8531 orang perempuan, totalnya 16.297 orang dan kepala keluarga 3907. Satu kesatuan atau keluarga rata rata terdiri dari 4 anggota. Sekitar setengah jumlah penduduk menganut agama Kristen serta Katolik dan setengahnya menganut agama Islam. Mata pencaharian karyawan terdiri dari 2000 swasta, 71 orang ABRI dan jumlah Pegawai Negeri Sipil 356 orang. Jumlah pedagang 116, pertukangan 476, petani 106, buruh tani 98, nelayan 4 pemulung 83, dan jasa 345.

Alat transportasi dan komunikasi adalah indikator kekayaan penduduk. Menurut informasi yang didapat di kelurahan ada 3 telephone umum, jumlah memiliki pesawat telepon 160, pesawat Televisi 2.169, pesawat radio 87 dan antenna parabola 39. Jumlah alat transportasi terdiri dari 47 sepeda, 6 dokar, gerobak 7, sepeda motor 115, microlet 56, mobil dinas 5 mobil pribadi 75 dan

jumlah truk 42. Perkebunan terdiri dari pohon kelapa yang luasnya 32 hektar. Hanya beberapa babi dan kambing dipelihara dan jumlah ayam terdiri dari 300 ekor saja. Wilayahnya mempunyai 41 kios, 25 toko dan 118 warung. Perumahan terdiri dari 365 yang permanen 2.089 semi permanen dan 862 non permanen.

4.3 Program JPS di Kelurahan Tuminting

- Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)

Program ini dilaksanakan di Madrasah Ibtidaiyah Al-Hijrah Manado sesuai dengan peraturan. Tiap periode, uang diterima sekolah yang digunakan untuk memasak makanan bagi anak. Beberapa menu variasi yang sesuai dengan saran dinas kesehatan dimasak suatu contoh adalah Binyolos. Variasi yang dibuat dari ubi galan, gula merah, telur tepung dan minyak goreng. Masakan ini diperuntukkan bagi 220 anak 306 kalori dan 55 gram protein. Pada tanggal 17 Mei 2000, dana dari pemerintah belum turun dan program ini berhenti sampai dana diterima administrasi sekolah. Program PMT-AS dilakukan ketika mayoritas anak tidak mampu makan cukup. Di madrasah ini 3 kali sampai 5 kali seminggu makanan diberikan tergantung jadwal atau program dan dana.

Disamping Madrasah Ibtidaiyah Al-Hijrah juga ada sekolah lain yaitu, Sekolah Dasar Negeri 72 (SDN 72). Menurut kepala sekolah beberapa program JPS dilakukan atau diberikan sekolah ini. Jumlah murid di SDN 72 adalah 150

murid yang dibagi 6 kelas, tanpa kelas paralel. Program PMT-AS dilakukan selama uang diberikan di sekolah dari pusat. Hari ketika penulis datang murid-murid menerima makanan yang dibungkus dalam daun pisang. Menurut data BAPPEDA partisipasi jumlah PMT-AS SD / MI dan pondok pesantren jumlah realisasi makan tambahan mencapai 5.065 siswa.

- **Beasiswa dan Dana Bantuan Operasional (DBO)**

Di SDN 72 ada 2 murid kelas 4, satu putra dan satu putri yang menerima beasiswa. Mereka menerima Rp 60.000 per 6 bulan lewat weselpos di kantor pos selama satu tahun. Untuk mendapatkan beasiswa sebuah komite sekolah memilih mahasiswa yang kurang mampu dengan prestasi yang cukup bagus. Murid yang prestasinya kurang baik tidak dapat beasiswa itu. Dana Biaya Operasional (DBO) belum didapat di sekolah tersebut. Dana ini digunakan untuk kegiatan sekolah untuk memperbaiki sarana pendidikan seperti: peta, buku-buku untuk siswa, foto kopi, buku perpustakaan dan lain lain.

- **Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan (JPS-BK)**

Untuk kegiatan ini, JPS-BK memilih puskesmas Teling Atas. Di sini 1836 Keluarga Kelompok menjadi sasaran dan semuanya diberi Kartu Sehat (KS). Di bulan Februari tahun 2000, 85 Ibu hamil yang menerima pelayanan. Untuk memperbaiki gizi Program Makanan Tambahan (PMT) telah dilaksanakan dan

bermanfaat bagi 200 jiwa termasuk ibu hamil, bayi dan anak. Untuk pemberantasan penyakit menular sejumlah 60 orang, penderita TB Paru dan Malaria, telah dilayani di puskesmas tersebut. Disini pasien dibantu dengan informasi untuk membuat obat tradisional dari kebun hidup atau TOGA. Misalnya : sakit amandel, gatal-gatal memakai daun sirih, untuk sakit pinggang diobati dengan kumis kucing dan kaki kuda.

- Operasi Pasar Khusus (OPK)

Waktu penulis di Sulawesi Utara (Sulut), belum diketahui adanya distribusi beras OPK, Oleh karena itu penulis bertemu pejabat Depot Logistik (Dolog) yang bertanggung jawab terhadap distribusi sembako itu. Di kantor, dijelaskan bahwa di bulan April 2000, 10 kg dijual-belian kepada kepala keluarga (KK) sesuai dengan subsidi yaitu sebanyak 226.000 KK, dan kebijaksanaan ini hanya berlaku di propinsi Sulawesi Utara. Menurut laporan bulanan, perkembangan program jaring pengaman sosial, bulan Februari 2000 ada masalah akses informasi antara TKPP-JPS dengan pengelola OPK. Hal ini disebabkan ketidaktahuan tanggal tentang pembagian beras tersebut.

Disamping menjual beras Dolog juga terlibat dalam aktifitas sebagai pembeli gabah dari petani. Hal ini sangat positif, karena kelompok ini kesulitan dalam memasarkan hasil buminya, yang menyebabkan impor beras, misalnya dari: Cina, Vietnam dan Thailand yang harganya sangat bersaing. Hal ini menyebabkan

nilai rupiah anjlok, sehingga menaikkan harga pupuk dan perlengkapan-perengkapan lainnya.. Gabah kering giling dibeli dengan harga Rp 1.400/kg dan gabah kering panen dengan harga Rp 1.095/kg yang kualitasnya harus memenuhi persyaratan yakni kadar air, kotoran dan maksimum persentase butir merah, kuning dan hijau.

BAB V

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

5.1. Pendahuluan Kota Yogyakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terletak di kaki Gunung Merapi yang sebelah utara dan selatan berbatasan dengan laut Kota ini pusatnya kebudayaan Jawa yang terkenal juga dengan sebutan kota pendidikan dan seni. Banyak lembaga, institut dan universitas ada disana dan mahasiswa datang dari seluruh Indonesia untuk belajar. Industri kerajinan keramik, yang dipasarkan di dalam negeri dan di ekspor ke luar negeri. Juga ada bengkel kereta api dan beberapa pabrik mesin, juga terdapat industri makanan seperti susu bubuk, dan makanan kecil. Pusat kebudayaan ini sangat menarik pariwisata internasional dan banyak penduduk bekerja di perhotelan, industri transportasi dan lain lain.

5.2. Sifat-Sifat Kelurahan Terban

Kelurahan Terban⁹ luas 797.224 hektar, terletak di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan ketinggian tanahnya dari permukaan laut kira-kira 120 meter dan suhu udara rata-rata antara 23⁰C dan 34⁰C. Penduduknya terdiri dari 7.137 orang laki-laki dan 7.272 orang perempuan dengan jumlah total 14.409 orang. Jumlah penganut agama Islam 9.347 orang dan penganut Kristen/Katholik

⁹ Umarsono, halaman 3

berjumlah 4935 orang. Mata pencaharian penduduknya terdiri dari 849 orang Pegawai Negeri Sipil, 23 orang ABRI dan 1.319 swasta. Jumlah pedagang terdiri dari 1.065 orang, pertukangan 130 orang, jasa 267 orang dan 331 pensiunan.

Tingkat kekayaan orang diperkirakan dengan jumlah kendaraan, alat komunikasi perumahan dan toko. Pemilik pesawat telepon 537 buah, pesawat TV 1.229 buah, radio 997 dan antena parabola 27. Transportasi yang dimiliki penduduk terdiri dari 941 sepeda, 153 becak, 1.905 sepeda motor, 23 buah mobil dinas, 149 buah mobil pribadi dan 7 truk. Perumahan terdiri dari 1.366 rumah permanen, 86 yang semi permanen dan 206 yang non-permanen.

4.3 Program JPS di Kelurahan Terban

- Program Makanan Tambahan Anak Sekolah

Di wilayah kelurahan Terban ada SD Muhammadiyah Sagan yang melakukan Program Makanan Tambahan Anak Sekolah swasta yang dibiayai secara pribadi. Program itu terdiri dari 2 jenis. Pertama, makanan tiap siang yang dipesan dari usaha catering. Murid yang mampu membayar dan murid yang tidak mampu mendapatkan secara gratis. Kedua, ada makanan snack sekali dalam seminggu yang disediakan orang tua murid yang cukup terpendang.

- Beasiswa dan Dana Bantuan Operasional (DBO)

Beasiswa yang didapat siswa terdiri dari dua jenis. Beasiswa SD Muhammadiyah dan beasiswa pemerintah (JPS). Dari pemerintah 13 murid di kelas IV dan V mendapatkan Rp 60.000 per semester selama 2 semester. Kriteria untuk mendapatkan beasiswa ini tergantung prestasi dan status ekonomi keluarga mahasiswa.

Beasiswa SD Muhammadiyah swasta diperoleh dari yayasan, diberikan kepada 30 siswa yang tidak mampu sebesar Rp 25.000,00 setiap bulan dan berlaku selama 6 tahun. Di samping beasiswa dari yayasan tersebut diatas, siswa juga mendapatkan bantuan kesehatan maksimum sebesar Rp100.000,00 untuk opname di rumah sakit.

SD Muhammadiyah Sagan tahun 2000 ini mendapatkan Rp 1.742.000,00 dana bantuan operasional (DBO) dari pemerintah. Bantuan ini digunakan untuk perlengkapan mengajar (alat peraga) seperti peta dan bola kaki. Digunakan untuk perbaikan gedung seperti pengecatan, kunci dan kaca jendela. Menurut informan dari sekolah, setiap sekolah mendapatkan rata-rata Rp1,5 juta sebagai DBO standar minimal yang disesuaikan dengan jumlah siswa yang tidak mampu.

- Jaringan Pengaman Sosial Bidang Kesehatan (JPS-BK)

Untuk itu penulis berkunjung di puskesmas Gondokusuman II dan wawancara langsung dengan staf. Disana terdapat orang yang tidak mampu sejumlah 592 Kartu Sehat (KS) diberikan kepada Kepala Keluarga (KK) artinya sejumlah masyarakat sekitar 2770 orang mendapatkan pelayanan kebidanan dan perawatan rujukan secara gratis. Orang yang tidak mempunyai Kartu Sehat harus membayar Rp 300 untuk mendapat konsultasi pelayanan sekali kunjungan dan membayar obat-obatan. Setiap hari kira-kira 100 pasien diperiksa di puskesmas ini dan diperkirakan 10 orang dari jumlah itu membawa KS. Menurut informan disana kebanyakan orang miskin di wilayah itu bekerja di sektor informal yakni pedagang kaki lima, pekerja kasar dan lain lain.

Sosialisasi program kesehatan JPS secara formal dan informal dilakukan melalui kantor kelurahan dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Posyandu sangat penting dalam rantai kesehatan. Di tempat inilah (Posyandu) orang pertama kali mendapatkan informasi tentang masalah kesehatan dan di tempat ini pula langsung ditangani oleh tenaga kesehatan seperti dokter atau paramedis. Informasi tentang imunisasi, gizi dan ibu yang baru melahirkan boleh menimbang bayinya. Puskesmas mengeluarkan dana kepada sukarelawan untuk menyalurkan pemberian makanan tambahan (PMT) kepada anak gizi buruk, balita dan ibu hamil dan ibu menyusui.

Salah satu pelayanan puskesmas yang lain adalah perawatan bagi orang yang menderita penyakit TB paru, mereka dibantu dengan konsultasi, obat-batan

dan mengunjungi rumah oleh wakil kesehatan untuk mengadakan inspeksi kondisi rumah tentang tingkat ventilasi dan tingkat pencahayaan. Kemungkinan dana Posyandu tidak cukup dan dana dari dinas kesehatan boleh digunakan membeli genteng kaca untuk memperbaiki tingkat cahaya untuk mencegah penyakit TB paru.

Untuk mengurangi biaya obat-obatan dianjurkan menggunakan obat tradisional untuk mengatasi penyakit ringan. Anggota masyarakat dalam wilayah itu boleh tertarik Tanaman Obat Keluarga (TOGA) untuk memperbaiki gizi, kelestarian alam atau memperindah pemandangan. Disamping untuk penghasilan tambahan juga digunakan sebagai obat tradisional seperti: radang tenggorokan, seriawan, menghilangkan keputihan dan mimisan.

- Operasi Pasar Khusus (OPK)

Program distribusi beras yang disubsidi sangat efisien di kelurahan ini. Truk dari Bulog datang membawa beras 50 kg/karung. Pejabat-pejabat Bulog membongkar barang di gudang, sementara Bulog dibayar langsung untuk beras yang dibongkar tersebut. Sekaligus diserahkan kepada RW untuk dibagikan kepada Kepala Keluarga (KK) yang berhak menerima. Dan penanggung jawab dari distribusi beras ini adalah lurah.

- Pelayanan LSM Palang Merah Indonesia

Ada beberapa program yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan orang miskin di daerah ini. Pertama, distribusi beras gratis. Masyarakat yang mempunyai kartu khusus berhak mendapatkan beras dari World Food Program Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang bekerjasama dengan LSM ini. PMI Cabang Kodya Yogyakarta mendapat 74.725 kilo beras dengan kualitas Myanmar jenis 25. Ini diberikan kepada Kepala Keluarga wanita, manusia lanjut usia (manula) yang hidup sendiri, anak yatim dan orang cacat sebanyak 20 kilo setiap dua bulan sekali.

Disamping mengelola distribusi beras, PMI juga menyediakan poliklinik dan klinik gigi yang buka setiap hari kerja untuk membantu rakyat yang tidak/belum mampu secara gratis, baik obat-obatan maupun pelayanan yang bekerjasama dengan Puskesmas.

- **Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)**

Program ini baru dimulai bulan Desember 1999 untuk mengatasi kesulitan yang diakibatkan krisis moneter dan dirancang oleh BAPPENAS Bidang Regional dan Daerah pada tahun 1999. Program ini dilakukan di Jawa saja sebab dampak krismon yang paling dahsyat adalah di Pulau Jawa. Di kelurahan Terban kantor P2KP melakukan program penanggulangan kemiskinan dengan jalan memberikan pinjaman bergulir pada kelompok usaha sendiri untuk memberdayakan masyarakat dengan menyuntik dana (modal) yang sesuai dengan standar

kelayakan usaha. Secara ideal, kelompok terdiri dari minimal 3 orang dan maksimal 15 orang. Contoh usulan proyek kredit ialah: pedagang kali lima (khususnya makanan), kerajinan bunga, warung makan di rumah, industri rumah, bengkel, jasa angkutan, jasa cuci pakaian, sablon, cetak, jasa membuat kunci, jasa rental komputer, pedagang buah, pedagang sepatu, servis elektro dan jasa terjemahan dan lain-lain.. Dana disini didapat tanpa jaminan tetap, tetapi alat seperti TV dicatat sebagai jaminan dalam kontrak resmi yang ditanda tangani dengan kertas segel (bermaterai). Bunga kredit tetap (*flat rate*) 18 persen per tahun atau 1.5% per bulan, itu seperti bunga rata-rata di bank.

Sosialisasi dan proses rencana pinjaman uang dilaksanakan dalam beberapa tahap. Pada umumnya sosialisasi dimulai melalui forum rapat yang dilakukan di kantor/tempat di kelurahan. Tahap kedua orang yang serius, membentuk kelompok yang sudah mempunyai usaha kecil atau mempunyai ide serta rencana usaha sendiri. Tahap ketiga, mereka membuat satu usulan (*proposal*) dengan rencana kegiatan (*action plan*). Tahap keempat usulan dan layanan usaha dari konsultan wilayah. Tahap kelima usulan dimasukkan ke kantor Bidang Swadaya Masyarakat untuk dievaluasi. Tahap keenam ketika evaluasi positif, dimasukkan ke Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) kecamatan untuk diresmikan dan ditandatangani. Tahap ketujuh usulan masuk ke KPKN kantor perbendaharaan dan kas negara (*state treasury*) dan uang disetor di rekening kantor P2KP dan akhirnya tahap kedelapan kredit dicairkan ke kelompok tertentu. Penulis menemui seseorang di kantor P2KP yang sudah menunggu selama 3 bulan sebelum kredit dicairkan, tetapi menurut pengelola proyek waktu 3 bulan adalah

waktu yang lama, hal ini disebabkan karena jalur masih baru, maka diharapkan dalam waktu 2 minggu kredit harus bisa didapatkan.

- Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDM-DKE)

Menurut informan di kantor kelurahan, program ini hampir sama dengan P2KP. Program ini dipakai untuk mengembangkan usaha diri seperti usaha makanan, minuman dan kerajinan, tetapi ada masalah dalam pengembalian uang yang dikredit/dipinjam masyarakat sebab tidak ada sanksi yang berat.

Penciptaan Lapangan Kerja Produktif

Program padat karya sektor Pekerjaan Umum Cipta Karya memperbaiki prasarana kampung dengan mempekerjakan pengangguran yang tinggal di kampung tersebut. Program tersebut sebagai berikut: misalnya suatu proyek memperbaiki prasarana, menciptakan lapangan kerja di kelurahan. Kemudian masyarakat kelurahan membuat suatu usulan yang terdiri dari bahan bangunan dan tenaga kerja. Selanjutnya dikirim ke BAPPEDA dan sebagai penanggung jawab program ini secara teknis adalah Dinas Perkerjaan Umum. Setelah disetujui usulan tersebut, dana akan disalurkan. Penulis melihat program tersebut diwujudkan dengan memperbaiki selokan di suatu daerah yang rendah yang sering terkena banjir akibat hujan deras, dengan membuat palang pintu (pembatas air).

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan Dari Hasil Pengamatan Studi Lapangan

Pengamatan di beberapa kelurahan menjelaskan bahwa ada beberapa program untuk membantu masyarakat lapisan bawah dalam mengatasi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Penulis berkunjung ke daerah yang mempunyai program-program Jaring Pengaman Sosial pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang dilaksanakan disana. Jumlah program-program itu tidak selalu sama di daerah yang dikunjungi penulis. Jenis dan ukurannya tergantung kebijaksanaan pemerintah pusat, provinsi, kota atau pengelola LSM.

Kelihatannya dampak krisis moneter berdampak sangat buruk bagi karyawan dan buruh yang mata pencahariannya di bidang industri dan jasa. Pendapat penulis, dengan keterangan yang didapat, maka program distribusi beras gratis sebagai program makanan sangat efektif dan transparan, staf sukarelawan dan staf biasa melakukannya dengan sepenuh hati. Ternyata, program bantuan JPS bidang kesehatan di puskesmas kelihatan juga sangat efektif seperti program yang terlibat memberdayakan masyarakat.

Sosialisasi program tersebut belum maksimal dan staf kantor kelurahan yang dikunjungi penulis, mungkin belum cukup mendapat ketrampilan untuk

menyampaikan informasi kepada orang yang memerlukan bantuan. Ketrampilan seperti itu akan bermanfaat bagi moral dan kebudayaan staf dan sukarelawan yang melaksanakan program tersebut. Masyarakat yang mendapat informasi yang sungguh-sungguh dan benar akan mengurangi keraguannya tentang program-program tersebut kepada masyarakat yang ingin mengembangkan suatu usaha mandiri dalam mendapatkan kredit kecil.

Orang yang mampu memenuhi kebutuhan secara normal untuk diri sendiri dan keluarganya, akan meningkatkan kesempatan ekonomis. Hal ini berlaku juga bagi pengelola dan staf program JPS. Ketika kebutuhan ini tidak dipenuhi dan mereka tidak puas, sehingga peluang KKN menjadi sangat besar. Perilaku ini akan mempengaruhi terhadap orang lain, yaitu menjadikan seperti lingkaran setan. Lingkaran setan ini sulit diberantas, kecuali ada sangsi/hukuman yang berat sehingga kebocoran tidak akan terulangi. Hal ini terungkap dalam beberapa artikel-artikel majalah serta surat kabar.

Menurut sebuah penelitian yang dilakukan sebuah universitas di Sulawesi, yaitu beberapa daerah di Indonesia yang tidak terpengaruh oleh keadaan kemacetan keuangan, tetapi di bagian Indonesia yang lain penduduknya menderita sebab tingkat aktivitas industri dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dasar sangat rendah. Khususnya kota-kota di Jawa yang terkena dampaknya, sehingga mempengaruhi daya beli masyarakat waktu itu yang sangat tinggi dan sekarang menjadi rendah. Mayoritas kegiatan ini untuk mengatasi kesulitan yang dilakukan

di kota-kota di Jawa dan nampaknya program ini lebih sempurna dari pada program yang dilakukan di Sulut. Pada umumnya Sulut yang ekonominya tidak tergantung pada aktivitas industri dan jasa secara besar lebih tahan dari kemacetan permodalan.

Penulis melihat pengelolaan proyek JPS terlibat birokrasi yang tidak selalu optimal. Penulis mengalami bahwa sukarelawan Palang Merah Indonesia dibandingkan Pegawai Negeri cukup bersemangat melakukan tugasnya, hal ini mungkin lebih cocok bagi sukarelawan yang mendapat kepuasan dalam membantu orang yang tidak mampu atau dari sosialisasi teman kerja. Pada umumnya semangat staf Puskesmas sangat tinggi yakni tenaga perawat dan dokter, di dalam memperbaiki kesehatan dan meningkatkan gizi masyarakat yang telah digariskan dalam program JPS. Hal ini sangat disayangkan apabila ada kabar buruk di surat kabar, sebab itu merendahkan semangatnya.

Beberapa program belum terlaksana disebabkan uang yang sudah dialokasikan untuk program ini belum cair. Menurut informan dan artikel surat kabar, program ini mengalami kebocoran yang besarnya belum diketahui. Kabar buruk ini mempengaruhi semangat orang yang memberi pelayanan dan orang yang mendapat pelayanan itu.

Banyak orang Indonesia yang tidak mampu, ingin mendapat bantuan tetapi mereka skeptis dan gelisah mencari bantuan secara aktif. Mereka bingung

mendapat bantuan dari pejabat yang menurut sumber media lain mungkin terkait dengan perilaku yang tidak baik. Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur) pernah berkata bahwa ada pejabat TNI sebesar 10 persen yang perilakunya kurang baik. Kesan ini menyebabkan orang tidak selalu percaya pada manfaat-manfaat program JPS. Menurut sukarelawan, LSM PMI terkesan buruk. Masih ada sebagian masyarakat yang berpikir bahwa PMI adalah organisasi yang hanya memberi suntikan yang hanya menimbulkan rasa sakit, hal ini menyebabkan mereka tidak selalu percaya pada bantuan PMI.

6.2. Saran

Usaha pemerintah dan organisasi lain untuk memulihkan perekonomian sudah dilakukan, tetapi banyak program yang belum jalan secara optimal. Hal ini dibutuhkan ketrampilan/pembinaan lebih lanjut bagi staf yang terlibat dalam program tersebut, sehingga dimasa yang akan datang akan meningkatkan kualitas etik/kebudayaan dan pengetahuan sumber daya manusia di dalam melaksanakan program tersebut.

Sosialisasi yang sangat luas tentang program harus dilakukan untuk mencapai sumber daya manusia yang mampu secara fisik. Kantor kelurahan adalah pusat informasi bagi masyarakat tetapi belum digunakan secara optimal/cukup didalam menyebarkan informasi yang dapat.

Dalam era reformasi masyarakat menuntut keterbukaan, tetapi sekarang masih sulit untuk mendapatkan keterangan tentang pengeluaran keuangan dari beberapa program tersebut. Mungkin itu lebih cocok ada aturan atau tekad yang menjelaskan pendapatan dan belanja tiap tingkat pemerintahan termasuk kelurahan.

Dewasa ini Indonesia sudah memasuki era “Masyarakat Orientasi Konsumsi” (*Consumption Orientated Society*), yang mungkin mendorong perbuatan yang tidak sesuai tugasnya. Untuk mencegah tindakan itu, pemerintah harus memperbaiki transparansi daftar biaya pelayanan pemerintah dan maksimum waktu prosesing untuk menyelesaikan urusan yang diminta dinas atau departemen.

Untuk membantu pegawai di dalam tugasnya harus disediakan peralatan kantor lengkap yang memadai dan upah pejabat harus disesuaikan dengan tugasnya.

Untuk melakukan program JPS secara efektif rantai antara orang yang dituju dan pusat harus diperkecil untuk memecah perilaku yang tidak normal. Subsidi yang dikeluarkan harus sampai pada kelompok yang ditarget dengan cara mengeluarkan kupon kepada orang yang perlu dibantu saja. Bila kebocoran ini terjadi bukan tanggungjawab pemerintah tetapi merupakan tanggungjawab masyarakat. Sanksi yang ketat/berat harus diterapkan terhadap orang yang terlibat dan inspeksi serta audit yang independen harus dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Surjadi, A., Drs., M.A., Ph.D., *Pembangunan Masyarakat Desa*, 1989, Bandung, Penerbit Mandar Maju.

Kerjasama: Menteri Negara Pangan Dan Hortikultura Dan Badan Urusan Logistik, *Buku I Pedoman Umum Dan Petunjuk Pelaksanaan Distribusi Operasi Pasar Khusus Beras*, Mei 1999, Jakarta, Bulog

Tim Penyusun Kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Dan Pengentasan Kemiskinan, *Laporan Pelaksanaan*, Juni 1999, Jakarta

Ismail Saleh (Mantan Jaksa Agung/Menteri Kehakiman), *Perbuatan Melawan Hukum Materiil*, Senin, 6 Maret 2000, Harian Kompas

Flores Chong (Wartawan bisnis Asia), *Growth pains hobble Asia reforms*, Selasa, 14 Maret 2000, Harian The Australian

Sebuah Wartawan, *Dikawatirkan Ganjal Pemuliah Ekonomi, Indonesia Tetap Paling Korup di Asia*, Kamis, 23 Maret 2000, Harian Jawa Pos

Wahyudi (Staf Pengajar UMM) Jurnal Interest - "*JPS Dalam Bingkai Ekonomi Kerakyatan*" Edisi Khusus 1999, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang

Prijono Tjiptoherijanto (Guru Besar Fakultas Ekonomi, universitas Indonesia), *Urbanisasi dan Perkembangan Perkotaan di Indonesia*, 8 Mei 2000, Harian Kompas

Prof Dr. Haryono Suyono. *Social Safety Net, Pengembangan, Konsep Dan Aplikasi* / editor Yulfita Rahaj dan Ingrid Kolb-Hindarmanto Jakarta PPT-LIPI, 1998.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

PROGRAM AUSTRALIAN CONSORTIUM FOR IN COUNTRY INDONESIAN STUDIES

Jl. Raya Tlogomas KM. 8 Telp. (0341) 464318 - 21 Psw. 132 Malang 65144

Nomor : E.6.k/194/UMM/III/2000
Lamp. : -
Hal : *Izin Program Pengalaman Lapangan*

Malang, 8 Maret 2000

Kepada : Yth. Kepala Daerah Tingkat II
1. Menado
2. D.I. Yogyakarta
3. Malang
4. Trenggalek
Di
T e m p a t

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, dengan ini kami sampaikan bahwa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik – Universitas Muhammadiyah Malang menyelenggarakan program khusus bagi mahasiswa Australia untuk mempelajari Bahasa dan Budaya Indonesia selama 1 (satu) semester.

Untuk lebih memperdalam pengetahuan tentang Bahasa dan Budaya Indonesia, maka mahasiswa Australia tersebut dibawah ini :

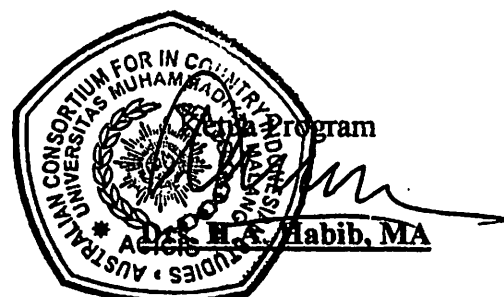
N a m a : Johan Weintre
Warganegara : Belanda
No. Paspor : N89698015

Bermaksud mengikuti Program Pengalaman Lapangan (PPL) di daerah yang Bapak pimpin sejak tanggal 21 Maret 2000 s/d Bulan Juni 2000.

Untuk itu, kami mohon kesediaan Bapak untuk memberikan izin dan fasilitas kepada mahasiswa tersebut.

Demikian atas bantuan dan perkenan Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jurusan : • Ilmu Kesejahteraan Sosial • Ilmu Pemerintahan • Ilmu Komunikasi
Jl. Raya Tlogomas Telp. (0341) 460948, 463513, 464318-19 Fax (0341) 460782 Malang 65144

Nomor : E.6.K/194/UMM/III/2000
Lamp. :
Hal : *Izin Program Pengalaman Lapangan*

Malang, 8 Maret 2000

Kepada : Yth. Kepala Daerah Tingkat II
1. Manado
2. D.I. Yogyakarta
3. Malang
4. Trenggalek
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, dengan ini kami sampaikan bahwa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik – Universitas Muhammadiyah Malang menyelenggarakan program khusus bagi mahasiswa Australia untuk mempelajari Bahasa dan Budaya Indonesia selama 1 (satu) semester.

Untuk lebih memperdalam pengetahuan tentang Bahasa dan Budaya Indonesia, maka mahasiswa Australia tersebut dibawah ini :

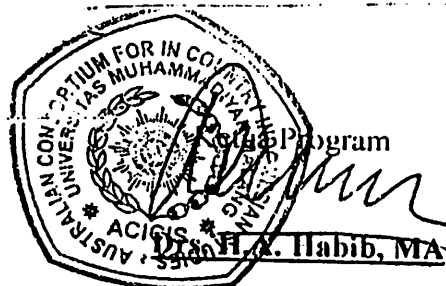
Nama : Johan Weintre
Warganegara : Belanda
No. Paspor : N89698015

Bermaksud mengikuti Program Pengalaman Lapangan (PPL) di daerah yang Bapak pimpin sejak tanggal 21 Maret 2000 s/d Bulan Juni 2000.

Untuk itu, kami mohon kesediaan Bapak untuk memberikan izin dan fasilitas kepada mahasiswa tersebut.

Demikian atas bantuan dan perkenan Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS KESEHATAN
Jl. Arjuno No.17 Telp.(0341) 362507 Malang

Malang, 22 Maret 2000.

Nomor : 423 / 1483 / 428.302/2000
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Puskesmas
1. Arjuno
2. Gribig
di-
Malang

Menindak lanjuti surat dari Universitas Muhammadiyah Malang No. E.6.k/194/UMM/III/2000, Tanggal 8 Maret 2000 Perihal Izin Program Pengalaman Lapangan.

Bersama ini kami hadapkan :
Nama : Johan Weintre
Warganegara : Belanda
No Paspor : N8968015

untuk melaksanakan Penelitian di wilayah Puskesmas saudara pada Tanggal 22,23 Maret 2000. Untuk itu kami mohon Saudara memberikan bantuan dan fasilitas yang diperlukan.

Demikian atas Perhatian dan kerjasama saudara disampaikan terima kasih.

Tembusan disampaikan :
Kepada. Yth. Sdr. Ketua Program UMM
di-

MALANG

a/n. Kepala Dinas Kesehatan
Kota Malang
Sub Bag. TU

Drs. H. BAMBANG SOENKOWO
PENATA
NIP.510075780



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MANADO
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PROGRAM-PROGRAM JPS
KOTA MANADO
TAHUN ANGGARAN 1999/2000

Jln. Balai Kota Nomor 1 Telp/Fax. (0431)847454

Manado, 11 April 2000

Nomor : 22/TKPP-JPS/2000
Lampiran : -
Perihal : Studi Lapangan

Kepada Yth :

1. Pengelola Program OPK Beras (Kantor Dolog Propinsi Sulut)
2. Pengelola Program PMT-AS (Kantor PMD Kota Manado)
3. Pengelola Program Beasiswa dan DBO Dikdasmen (Kandepdikbud Kota Manado)
4. Pengelola Program DOP (Dinas PDK Manado)
5. Pengelola Program PKP-JPS, Sub Dinas Cipta Karya Dinas PU Prop. Sulut

Di

M A N A D O

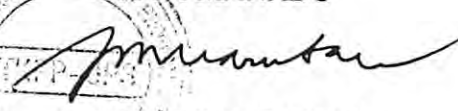
Menunjuk Surat Ketua Program Studi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang Nomor : E.6.K/194/UMM/III/2000, perihal Izin Program Pengalaman Lapangan maka bersama ini dengan hormat kami perhadapkan kepada Mahasiswa Australia dengan data seperti tersebut dibawah ini :

Nama : JOHAN WEINTRE
Warga Negara : BELANDA
No. Paspor : N89698015
Judul Tema : Krismon Kesejahteraan Masyarakat – JPS

Kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan data/informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan JPS dalam rangka penyelesaian tugas akhir (Tesis) pada Universitas Muhammadiyah Malang.

Demikian penyampaian kami atas bantuannya diucapkan terima kasih

KETUA BAPPEDA KOTA MANADO
SELAKU
KETUA TIM KOORDINASI PENGELOLAAN
PROGRAM-PROGRAM JARING PENGAMAN SOSIAL
(TKPP-JPS)
KOTA MANADO


Ir. JOOST TAMBAJONG
NIP 560 006 300



PEMERINTAH DAERAH KOTA MANADO
DINAS KESEHATAN

Jln. Balai Kota No. 1 Manado Telp. (0431) 864204 - 846944

N o m o r : 160/440.001/110/2000
Lamp. :
Perihal : Peninjauan Lapangan

Manado, 10 April 2000

Kepada Yth.

1. Kepala Puskesmas Tuminting
2. Kepala Puskesmas Wawonasa
3. Kepala Puskesmas Kombos
4. Kepala Puskesmas Bengkol
5. Kepala Puskesmas Paniki Bawah
6. Kepala Puskesmas Ranomuut
7. Kepala Puskesmas Tikala Baru
8. Kepala Puskesmas Teling Atas
9. Kepala Puskesmas Ranotana Weru
10. Kepala Puskesmas Bahu

di -

Manado,-

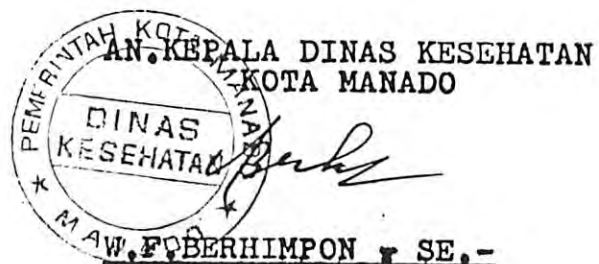
Menunjukkan Surat Ketua Program Studi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang Nomor: E.6.K/194/VMM/III/2000.- Perihal seperti tersebut diatas maka bersama ini kami perhadapkan kepada Mahasiswa dibawa ini :

N a m a : JOHAN WEINTRE
Warganegara : Belanda
No. Paspor : N89698015
Judul Tema : Krismon Kesejahteraan Masyarakat-JPS

Kiranya dapat diberikan data /informasi mengenai penggunaan dana JPS dalam rangka menyelesaikan tugas Akhir (Tesis) pada Universitas Muhammadiyah Malang di unit kerja saudara.-

Demikianlah penyampaian ini untuk diperhatikan .-

Atas bantuannya diucapkan terima kasih.-



NIP. : 560 008 054.-



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Komplek Balaikotamadya Jalan Kenari No 56 Yogyakarta Telp.515865 / 515866 Psw.04

SURAT KETERANGAN / IZIN

Nomor : 070/425

- Dasar** : Surat izin/Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor :
Tgl.
- Mengingat** : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 072/KD/1986
tanggal 6 Mei 1986 tentang : Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Kepala Daerah Istimewa
Yogyakarta, Nomor 33/KPTS/1986 tentang : Tatalaksana Pemberian izin bagi setiap Instansi
Pemerintah maupun Non Pemerintah yang melakukan Pendaftaran/Penelitian.
- Diizinkan kepada** : Nama : Johan Weintre, No. Paspor N89698015
Pekerjaan : Studi Program Pengalaman Lapangan UMY.
Alamat : Malang (Jl. Raya Tlogomas Km.8)
Penanggung Jawab : Drs.H.A.Habib, MA
Keperluan : Mengikuti Program Pengalaman Lapangan
di DIY dan Kota Yogyakarta
- Lokasi / Responden** : DIY & Kota dengan tema;
Krisman-Kesejahteraan Masyarakat-JPS.
- Waktu** : Mulai pada tanggal 21-3-2000 s/d 21-6-2000
- Lampiran** : -
- Dengan Ketentuan** : 1. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Yogyakarta (Cq. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kodya Dati II
Yogyakarta).
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.
3. Izin ini tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan
Pemerintah dan hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah.
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-keten-
tuan tersebut diatas.

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di : Yogyakarta.

Pada tanggal : 1 - 5-2000

Tanda tangan
Pemegang izin


Johan Weintre

An. Walikotamadya Kepala Daerah
Ketua Bappeda

Ub. PLH. Ka. Bid. Pendaftaran & Laporan


Drs. Sri Adiyanti.

NIP. 490024695.

Tembusan kepada Yth. :

1. Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II Yogyakarta.
2. Ketua Bappeda Propinsi DIY.
3. Kepala Kantor Sospol Kodya Dati II Yogyakarta.
4. Ka. Kanwil. Sosial Prop. DIY.
5. Ka. Kanwil PU Prop. DIY (Jl. Munggur Yk)
6. Ka. Kopertis WilV Yogyakarta.
7. Ka. PMD Kota Yogyakarta.
8. Ka. Bag. Perekonomian Setda. Kota Yk.



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

DINAS KESEHATAN

Jl. Prof. Dr. Sardjito No. 5 Telp. 515868, 515869 Yogyakarta 55233

Nomor: 421/797

Yogyakarta, 1 Mei 2000

Sifat : Biasa

Hal : Peninjauan Lapangan

Kepada

Yth. 1. Ka. Pusk. Gondokusuman II

2. Ka. Pusk. Tegaltrejo

Di YOGYAKARTA

Berdasarkan surat Ketua Program Studi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Malang Nomor : E.6.K/194/UMM/III/2000 tanggal 8 Maret 2000 perihal Izin Program Pengalaman Lapangan, dengan ini dihadapkan mahasiswa :

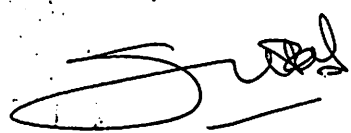
Nama : JOHAN WEINTRE
Warganegara : Belanda
No. Paspor : N 8968015
Judul Tema : Krismon - Kesejahteraan
Masyarakat - JPS

Yang bermaksud mengikuti Program Pengalaman Lapangan (PPL) di wilayah kerja Saudara.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kesediaannya untuk membantu terlaksananya program tersebut.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan atas bantuannya diucapkan terima kasih.

Kepala,



Dr. Suratimah Wiyono
NIP. 140 075 667